

e-news letter

MAR III 2020

**PKSPARLEMEN**

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



H. ROFIK HANANTO, S.E.

# Pemerintah Harus Pastikan

Ketersediaan Masker  
& Peralatan Kesehatan



# Paramedic First, baru ‘lockdown’

Jangan sampai tenaga medis jadi korban akibat kekurangan APD ini. Kita perlu pikirkan keselamatan jiwa mereka juga. Pemerintah harus segera menyiapkan APD yang dibutuhkan.

Sejak pecah telur tanggal 2 maret 2020, terjadi pergerakan yang sangat signifikan dan massif. Jika awalnya hanya di depok, hingga tanggal 23 Maret 2020 telah menjangar di 22 Provinsi dengan 579 kasus pasien yang positif dan 49 orang meninggal. Angka tertinggi DKI Jakarta dengan 353 pasien positif dan sebanyak 29 orang meninggal dunia.

Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto saat menyampaikan data ini setiap hari nampak sudah kehilangan ekspresi. Sejatinya data ini sungguh bukan hal yang mengembirakan, namun jadi pilu dan getir yang mengkhawatirkan. Sampai kapan absensi pasien covid 19 ini akan disampaikan? Haruskah hingga status Darurat Corona 29 Mei 2020.

Pekan belum berganti bulan, masalah dan kendala

mulai menyembul kepermukaan. Selain jumlah pasien yang terus meningkat, keluhan utama terkait alat pelindung diri (APD), kelangkaan hand sanitizer dan masker terjadi disejumlah rumah sakit, ironisnya hal ini terjadi juga di RS Rujukan Covid-19. Hal ini menunjukkan kesiapan Pemerintah dalam mengantisipasi Covid-19 dilakukan dalam keadaan reaktif, bukan preventif sejak awal.

Sesungguhnya tenaga medis seperti dokter, perawat, laboratorium, dan lainnya adalah garda terdepan dalam penanganan covid-19. Mereka yang berjibaku langsung bukan hanya dengan pasien, namun juga dengan virus. Resiko besar ada di hadapan mereka setiap saat, bahkan paling mungkin terpapar lebih dulu. Pemerintah harus memastikan bahwa segala perlengkapan dasar

tenaga medis “lahir dan bathin” dalam menangani virus corona terpenuhi. Rasanya “nelongso” jika melihat apa yang berkembang di media sosial terkait ketersediaan APD di rumah sakit bagi para tenaga medis. Ada yang menggunakan jas hujan, kantong plastic dan sejenisnya. Perih haru menyelimuti itu jika menyaksikan itu.

Kita menyaksikan sendiri tenaga medis dan rakyat terdampak lebih membutuhkan. Fraksi PKS sendiri selama beberapa hari mencanangkan gerakan berbagi masker dan disinfektan gratis ke tempat-tempat ibadah dan rumah sakit/klinik. Pemerintah jangan hanya fokus pada penanganan pasien tapi melalaikan kebutuhan APD tenaga medis dan petugas lain yang terlibat.

Jangan sampai tenaga medis jadi korban akibat kekurangan APD ini. Kita perlu pikirkan keselamatan jiwa mereka juga. Pemerintah harus segera menyiapkan APD yang dibutuhkan.

Apalagi anggarannya sudah disiapkan (BNPB). PKS akan dukung adanya perubahan APBN 2020 untuk realokasi anggaran terkait percepatan penanggulangan covid 19 ini. Dengan musibah ini maka seluruh komponen bangsa



Salah satu bentuk dukungan Fraksi PKS DPR RI untuk Para tenaga Mdis

untuk bersatu, bahu membahu berempati&membantu para tenaga medis yang saat ini menjadi garda terdepan dalam menghadapi virus Covid-19 di Indonesia. Disisi lain cara yang paling mudah untuk membantu para tenaga medis yakni untuk tetap mengisolasi diri di rumah sesuai dengan imbauan pemerintah. Sejalan dengan itu kita harus melakukan berbagai kegiatan yang sehat dan produktif dari rumah.

Saatnya seluruh komponen bangsa bersatu dan bahu membahu menghadapi virus covid 19 yang menteror warga dunia, dan semakin mewabah

di Indonesia, dan memberikan simpati, doa dan dukungan yang maksimal kepada para tenaga medis, agar para tenaga medis (dokter, perawat dll) tetap/selalu sehat dan bersemangat unt rawat dan sembuhkan pasien Covid 19, dan menghentikan teror Covid 19.

Kita sangat prihatin dengan wafatnya beberapa Tenaga Medis (Dokter dan Perawat), juga jatuhnya korban yang melonjak. Semoga tak terjadi lagi, dan semoga yang wafat diterima oleh Allah ditempat yang terbaik.

Humas Fraksi PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

## LAWAN VIRUS CORONA

### Ketua Fraksi PKS Pimpin Langsung Penyemprotan Disinfeksi di Masjid Baitul Muawwanah

*Saatnya aksi nyata melampaui narasi. Dalam ikhtiar berkontri-busi mencegah penyebaran Covid 19, Sabtu (21/3) Tim Kesehatan Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, MA melakukan program penyemprotan Disinfeksi di Masjid Baitul Muawwanah Perum Taman Krakatu Blok I, Kabupaten Serang. Banten*



# Jazuli Juwaini Pimpin Langsung Gerakan Pembagian Masker dan Disinfektan Rumah Ibadah Gratis

Sesuai gerakan yang dicanangkan Fraksi PKS hari ini saya turun langsung menyambangi masjid-masjid di wilayah Serang-Cilegon Provinsi Banten. Luar biasa antusiasme takmir masjid dengan gerakan Fraksi PKS ini. Banyak sekali masjid yang mendaftar dan meminta untuk disemprot disinfektan secara gratis, kita akan kerjakan sesuai prioritas

## Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Serang (21/3) - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini turun langsung memimpin gerakan pembagian masker dan disinfektan rumah ibadah gratis. Jazuli dan tim relawannya mengunjungi sejumlah masjid besar di daerah pemilihannya dan melakukan penyemprotan disinfektan.

"Sesuai gerakan yang dicanangkan Fraksi PKS hari ini saya turun langsung menyambangi masjid-masjid di wilayah

Serang-Cilegon Provinsi Banten. Luar biasa antusiasme takmir masjid dengan gerakan Fraksi PKS ini. Banyak sekali masjid yang mendaftar dan meminta untuk disemprot disinfektan secara gratis, kita akan kerjakan sesuai prioritas," ungkap Jazuli.

Takmir salah satu masjid yang mendapatkan layanan yaitu Masjid Nurul Iman di Kecamatan Waringinkurung Serang, Ustadz Parjiman,

mengaku gerakan Fraksi PKS ini sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan. Dirinya dan jamaah mengapresiasi kesiapsiagaan dan cepat tanggapnya PKS dalam merespon permohonan DKM. Pengakuannya, DKM sempat kesulitan mengakses layanan disinfektan ke pihak-pihak terkait termasuk alat dan cairannya. Mereka bersyukur Fraksi PKS datang dengan cepat dan tanggap karena di Kecamatan Waringinkurung sejumlah orang dalam pemantauan dan pengawasan Covid-19.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan gerakan ini sengaja dicanangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang saat ini sangat mendesak. "Dalam keterbatasan kemampuan kami, Fraksi PKS tetap berikhtiar untuk menghadirkan solusi bagi masyarakat dalam menghadapi virus corona atau covid-19 ini," katanya.

Anggota DPR Dapil Banten ini berharap ikhtiar Fraksi PKS seluruh Indonesia ini bisa mengurangi risiko dan



melindungi masyarakat dari wabah covid-19. "Secara khusus kami berpesan kepada masyarakat jaga kesehatan dan stamina tubuh, bersihkan diri dan lingkungan secara tertib

serta batasi diri keluar rumah dan mendatangi keramaian. Ikuti instruksi pemerintah itu sikap terbaik saat ini," pungkas Jazuli.

# Rofik Minta Pemerintah Serious Pastikan Ketersediaan Masker dan Peralatan Kesehatan

Saya meminta pemerintah serius memperhatikan kondisi ini. Kalau tidak bisa memberikan masker secara gratis kepada masyarakat, setidaknya pemerintah dapat memastikan ketersediaan kebutuhan tersebut cukup dan tidak ada kenaikan

## H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jateng

Jakarta (20/03) — Anggota DPR RI FPKS Dapil Jawa Tengah VII, Rofik Hananto, meminta pemerintah serius memastikan ketersediaan masker, hand sanitizer dan peralatan kesehatan lainnya di tengah mewabahnya virus corona atau Covid 19.

"Pemerintah harus benar-benar memastikan ketersediaan masker, hand sanitizer dan peralatan kesehatan yang dibutuhkan di tengah mewabahnya virus corona," tutur Rofik.

Rofik menambahkan saat ini permintaan masker dan hand sanitizer sangat tinggi, tetapi banyak terjadi kelangkaan dimana-mana, sehingga

harga pun mengalami kenaikan cukup tinggi.

"Saya meminta pemerintah serius memperhatikan kondisi ini. Kalau tidak bisa memberikan masker secara gratis kepada masyarakat, setidaknya pemerintah dapat memastikan ketersediaan kebutuhan tersebut cukup dan tidak ada kenaikan," terangnya.

Banyak sekali keluhan masuk dari masyarakat khususnya tenaga medis terkait sulitnya mencari masker dan hand sanitizer, walaupun ada stoknya sangat terbatas dan harganya yang sangat tinggi.

Presiden Jokowi dalam sambutan rapat terbatas, Kamis (19/03/2020)

mengatakan untuk ekspor masker dan alat kesehatan yang diperlukan, lebih baik disetop terlebih dulu.

"Pastikan terlebih dahulu stok dalam negeri cukup. Kemudian, ketersediaan bahan baku untuk produksi alat kesehatan dalam menghadapi situasi ini," kata Presiden RI ketujuh ini.

Rofik menyambut baik rencana pemerintah ini, dia meminta ini benar-benar dilaksanakan dan diawasi betul.

"Saya menyambut baik rencana pemerintah menghentikan sementara ekspor masker untuk sementara waktu guna memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi, Tetapi saya harap ini benar-benar dilaksanakan dan awasi betul, agar tidak ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan kondisi ini untuk mendulang keuntungan besar di tengah sulitnya masyarakat mendapatkan kebutuhan ini" kata rofik.

Saat ini pasien positif corona terus bertambah, dibutuhkan peran semua pihak untuk berkerjasama menghadapi kondisi ini.





# Tiga Srikandi Fraksi PKS DPR Turun Tangan Bantu Tenaga Medis RS Persahabatan

Kehadiran kami hari ini untuk mengapresiasi dan berterima kasih pada para Dokter, Perawat juga tenaga medis lainnya yang menjadi garda terdepan dalam penanganan virus Corona yang meresahkan masyarakat

**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (21/03) — Tiga Srikandi Fraksi PKS DPR RI yakni Ledia Hanifa, Netty Prasetyani dan Kurniasih Mufidayati mendatangi RS Persahabatan, guna memberikan bantuan kepada Tenaga Kesehatan yang menjadi garda terdepan penanggulangan wabah Covid-19, Sabtu, (21/03/2020).

Dalam kesempatan tersebut, ketiga orang Srikandi Fraksi PKS juga menyampaikan ucapan terimakasih dan memberikan apresiasi atas tugas segenap tenaga kesehatan.

"Kehadiran kami hari ini untuk meng-apresiasi dan berterima kasih pada para Dokter, Perawat juga tenaga

medis lainnya yang menjadi garda terdepan dalam penanganan virus Corona yang meresahkan masyarakat", pungkaskannya.

Selain itu, ketiganya juga memberikan dukungan moril dan doa untuk para tenaga kesehatan yang sudah memper-taruhkan jiwa raga utk menyembuhkan pasien Covid-19.

"Sebagai bentuk dukungan, kami bertiga membawa bantuan masker N-95, alkohol 70% dan hand sanitizer kepada perwakilan tenaga kesehatan yang berjaga siang ini," ungkapnya.

Kunjungan ketiga Srikandi Fraksi PKS diterima dengan

rasa haru oleh tenaga kesehatan RS Persahabatan.

"Barang-barang yang diberikan perwakilan Fraksi PKS ini, sekarang sangat berharga, bahkan seperti emas, untuk membantu faskes menangani pasien Covid19," ungkap salah seorang tenaga medis.

Saat ini, lanjut tenaga medis, APD, Alkes dan obat-obatan mulai menjadi barang langka dan mahal. Termasuk masker biasa dan masker N-95.

"Kami berharap, pemerintah harus segera bertindak dalam mengendalikan kelangkaan dan melejitnya harga masker, handsanitizer, dan alkes lainnya," tutupnya.



# Aleg PKS: Pemerintah Harus Pastikan Ketersediaan Pangan di tengah Wabah Corona

Saya meminta kepada pemerintah, agar ada statement dan regulasi yang ditetapkan untuk memastikan pendapatan petani yang memadai dengan kepastian harga yang baik tidak diganggu aktivitas impor. Yang penting bagi seluruh masyarakat, ada jaminan akses pangan yang mudah di dapat dengan harga wajar atau normal

## **Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (19/03) — Anggota DPR RI komisi IV yang membidangi pertanian dan pangan, Hamid Noor Yasin menanggapi janji kementerian pertanian yang mengatakan, stok 11 kebutuhan pangan dalam kondisi aman di tengah merebaknya wabah virus corona mesti di imbangi dengan regulasi sampingan yang pro rakyat. Pasalnya, beberapa hari ini ia mendapat laporan terkait regulasi kementerian

perdagangan yang makin memperbesar kran impor bawang putih.

Bukan hanya itu, Legislator asal Jawa tengah IV ini juga mendapat masukan terkait arahan Menko yang meminta mengeluarkan semua PI (persetujuan impor) bahan pokok seperti gula, beras dan sebagainya.

"Ini kok tidak sejalan dengan antara keyakinan menteri pertanian yang

menepis stok pangan saat ini dalam kondisi menepis sehingga masyarakat tak perlu khawatir terjadinya kekurangan pasokan serta kenaikan harga barang. Di sisi lain, semua kran impor pangan dibuka", tegas Hamid.

Politisi PKS ini menyoroti bahwa pada hasil pengumuman Rapat terbatas (Ratas) Kabinet pada pembahasan pangan yang menyatakan pasokan cukup aman untuk 11 bahan pokok pangan, mestinya tidak ada opsi langkah buka kran impor kembali. Monitoring yang menemukan kelangkaan beberapa komoditas, perlu diduga ada permainan pedagang besar yang nakal dengan pola permainan menahan stok.

"Saat ini kan rupiah lagi jatuh, tentu barang yang masuk dari luar akan menggerus devisa. Sebaiknya Opsi Impor di abaikan dengan mengoptimalkan potensi dari Dalam Negeri. Ketersediaan pangan di undang-undang pangan kita jaminan itu bukan berasal dari impor, tapi



disediakan dari negeri sendiri. Ini yang dimaksud Kedaulatan Pangan", ucap Hamid.

Politisi PKS ini menyarankan kepada pemerintah agar pada penanganan dan peredaman Covid-19 untuk tidak meluas, diharapkan tidak akan mengganggu aktivitas usahatani baik musim panen dan persiapan pertanaman berikutnya. Regulasi khusus untuk mendukung dan mempermudah aktivitas usahatani pertanian terutama dalam penyediaan pangan,

menjadi sangat strategis karena untuk bertahan hidup, setiap makhluk hidup butuh makan.

"Saya meminta kepada pemerintah, agar ada statement dan regulasi yang ditetapkan untuk memastikan pendapatan petani yang memadai dengan kepastian harga yang baik tidak diganggu aktivitas impor. Yang penting bagi seluruh masyarakat, ada jaminan akses pangan yang mudah di dapat dengan harga wajar atau normal", pungkas Hamid Noor Yasin.

*You Stay At Home,  
We Stay At Parliament*



## WNI di Sudan Diperlakukan Diskriminatif

# Toriq minta Kemenlu Responsif



Tasikmalaya (20/03) —Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Toriq Hidayat mendapatkan keluhan dari salah seorang mahasiswa Indonesia di Sudan bahwa telah terjadi perlakuan diskriminatif terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Sudan.

Anggota komisi I ini turut

prihatin atas penyebaran virus corona di Sudan yang telah menyebabkan satu orang meninggal dunia, pria berusia 50 tahun yang meninggal di ibukota Khartoum.

Namun Toriq Hidayat juga menyayangkan perlakuan diskriminatif terhadap WNI di Sudan.

"Seorang mahasiswa Indonesia menyampaikan bahwa WNI di Sudan sedikit-sedikit diteriaki corona bahkan mahasiswa Indonesia di Omdurman diusir dari Asrama. Sayangnya KBRI disana terkesan tidak berbuat apa-apa", ungkap Toriq.

"Saya turut prihatin terhadap negara Sudan dan seluruh negara yang telah terjangkit oleh virus ini, termasuk Indonesia. Saya sampaikan bahwa Warga Negara Indonesia yang bermukim di Sudan bukan merupakan sumber penyebaran virus", Tambah Toriq.

Seperti diketahui, perlakuan diskriminatif sebelumnya telah terjadi pada warga negara China di Amerika. Perlakuan tidak tepat juga dirasakan oleh warga negara Jepang di Indonesia dan saat ini perlakuan kurang menyenangkan dirasakan oleh WNI di Sudan.

Dampak seperti itu yang dikhawatirkan WHO, jika sejumlah negara tidak bijak bersikap menghadapi wabah ini akan memicu ketakutan berlebihan yang berdampak terhadap perbuatan diskriminatif.

Namun respon cepat

---

Saya meminta kepada kemenlu agar responsif terhadap kabar perlakuan diskriminatif terhadap WNI di Sudan. Segera berkomunikasi secara intensif dengan pemerintah Sudan dan berikan pelayanan terbaik kepada WNI serta memastikan WNI disana dalam kondisi baik secara fisik maupun psikologis

**KH TORIQ HIDAYAT, Lc**

Anggota Komisi I DPR RI

---

dilakukan oleh Pihak negara China dan Negara Jepang saat mengetahui warga negaranya mendapatkan perlakuan tidak tepat akibat wabah ini. Mereka mengadakan jumpa pers melalui kedutaan besarnya menyatakan telah melarang warga negaranya bepergian ke negara lain dan tidak perlu khawatir karena penanganan wabah virus corona di negaranya dilakukan secara komprehensif dan terus berjalan.

"Selanjutnya saya meminta kepada kemenlu agar responsif terhadap kabar perlakuan diskriminatif terhadap WNI di Sudan. Segera berkomunikasi secara intensif dengan pemerintah Sudan dan berikan pelayanan terbaik kepada WNI serta memastikan WNI disana dalam kondisi baik secara fisik maupun psikologis", pintanya yang disampaikan secara tegas.

# DPR: Pemerintah Awalnya Meremehkan, Kini Gagap Hadapi Wabah Corona

Sampai hari ini pemerintah belum memiliki skema jelas dalam penanganan wabah Corona. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat di berbagai daerah banyak yang mengeluh, bingung dan semakin khawatir akibat tidak mendapatkan pelayanan secara aman dan meyakinkan ketika merasa ada indikasi terpapar virus COVID-19

## H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (17/03) — Pemerintah yang pada awal mula munculnya virus Corona seperti menganggap remeh kini malah gagap menghadapi wabah Corona. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Komisi I DPR RI, Sukamta dalam pesan tertulisnya Selasa, (17/03/2020).

"Sampai hari ini pemerintah belum memiliki skema jelas dalam penanganan wabah Corona. Kami mendapatkan informasi dari

masyarakat di berbagai daerah banyak yang mengeluh, bingung dan semakin khawatir akibat tidak mendapatkan pelayanan secara aman dan meyakinkan ketika merasa ada indikasi terpapar virus COVID-19," sebut anggota Komisi I DPR RI ini.

Menurut Sukamta masyarakat yang ingin mengecek kondisi karena memiliki gejala dan riwayat kontak dengan suspect bahkan positif Corona ketika datang ke rumah sakit rujukan semakin

bingung dan khawatir.

"Penanganan pasien amburadul, mulai dari ruang isolasi yang tersedia ternyata banyak ditemukan kurang layak seperti pasien yang memiliki indikasi COVID-19 disatukan dalam satu ruangan yang berisi 4-6 orang. Ruang isolasi sangat terbatas jumlah maupun fasilitasnya. Setelah dicek di lapangan banyak rumah sakit di berbagai daerah belum memiliki fasilitas memadai seperti negatif pressure. Fasilitas yang dipergunakan untuk isolasi merupakan peninggalan dari kasus-kasus sebelumnya.

Pemerintah pun sampai sekarang belum menyediakan anggaran untuk perlengkapan maupun penambahan ruang ruang yang diperlukan," beber Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI.

Sejak pengumuman kasus pertama, kasus-kasus selanjutnya membuat publik bingung. Ditemukan beberapa kasus yang berubah hasil salah satunya pasien suspect asal Bekasi yang meninggal di Cianjur. Perubahan hasil ini



menurut Sukamta akibat tidak terdapat standar Virus Transport Medium (VTM).

Padahal persoalan manajemen sampel yang dikirim ke laboratorium merupakan hal krusial untuk menentukan status pasien. Jika manajemen tidak sesuai standar bisa mengakibatkan hasil negatif palsu yaitu hasil negatif namun pada kenyataannya positif COVID-19.

"Selain persoalan VTM, jumlah kasus terus bertambah secara signifikan setiap hari 3 lab yang ditunjuk pemerintah untuk memeriksa sampel tidak akan sanggup dan secara cepat memproses specimen.

Walaupun pemerintah telah menambah lokasi pengujian sampel di Balai Besar Teknik

Kesehatan Lingkungan (BBTKL) dan Universitas Airlangga, dan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Institute namun dua lab tersebut dirasa masih kurang. Harus penambahan alat dan sinergi dengan kampus dan perusahaan yang memiliki peralatan uji COVID-19," saran Doktor Lulusan Inggris ini.

Persoalan kemanusiaan pun bertambah, yaitu seolah olah Negara sengaja mengorbankan awak medis. "Jubir pemerintah mengatakan bahwa merupakan sebuah resiko yang harus ditanggung oleh tenaga medis ketika menangani pasien COVID-19.

Selengkapnya kunjungi  
Fraksi.pks.id

# Mardani Dorong ASN Produktif ditengah Pandemi Corona Virus

Sangat beresiko jika ASN masih tetap bekerja karena pasti di kantor akan bertemu dengan rekan kerja, atasan. Apalagi salah satu Menteri Indonesia maju sudah ada yang positif

## Dr. H. MARDANI, M.Eng

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (17/03) — Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mengapresiasi kebijakan cepat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk memperbolehkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja di rumah.

“Kebijakan ini positif dalam sekali! Salute untuk Pak Menteri. Saya berharap ASN tetap produktif bekerja di rumah seperti halnya di kantor,” kata Mardani, Selasa (17/03).

Lebih lanjut, legislator Fraksi PKS DPR RI itu mengatakan bahwa penyebaran Covid-19 sangat cepat dan

beresiko di krumunan orang.

“Sangat beresiko jika ASN masih tetap bekerja karena pasti di kantor akan bertemu dengan rekan kerja, atasan. Apalagi salah satu Menteri Indonesia maju sudah ada yang positif,” ujar Mardani.

Mardani yang terpilih dari Dapil Jakarta Timur itu mengungkapkan skema Work from Home (WFH) dan Study from home (SWF) menjadi pilihan yang bijak.

Mardani memberikan catatan atas kebijakan WFH dan SWF lebih efektif :

Pertama, Kebijakan Wfh dan Sfw harus diiringi

implementasi yang detail kepada ASN. pelaksanaan bisa menurunkan produktivitas bila terkendala masalah seperti ini mengingat negara kita sedang terus berjuang lepas dari middle income traps.

Kedua, Setiap K/L dan Pemda perlu membuat petunjuk pelaksanaan untuk memastikan setiap pelayanan tetap berjalan.

“Seperti ASN & PPK membuat jalur komunikasi sampai mengumumkan pusat layanan dgn call center yg mudah di akses. Ini penting sebagai kanal pengaduan jika ada ASN atau PPK yang tidak bekerja sesuai standar,” kata Mardani.

Ketiga, Mekanisme pengawasan diperlukan dan penting untuk memastikan setiap orang tidak lepas dari tugasnya sekaligus menjadi ukuran kinerja. Begitu juga dgn sistem remunerasi & sanksi yang jelas.

“Jangan sampai kewenangan yang turut diberikan ke daerah ini menurunkan produktivitas,”



ungkap Mardani.

Keempat, Kebijakan ini kita harapkan tidak menghambat laporan yang datang dari masyarakat.

“Contoh, keberadaan masker saat ini terbilang langka, begitu juga dengan beberapa bahan makanan pokok. Hal ini harus tetap dipastikan walaupun petugas sedang tdk berada di kantor/lapangan,” tandas Mardani.

oleh karena itu, Mardani mengusulkan dibentuknya Gugus tugas reaksi cepat yang dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai.

“Gugus tugas ini berfungsi sebagai pemantau kondisi lapangan yg berkoordinasi dgn kepolisian maupun pihak terkait,” tuturnya.

Terakhir Mardani mengusulkan pemerintah untuk dapat memberikan insentif utk ASN yang memiliki kinerja baik meski bekerja di rumah.

“Ini penting untuk membangun mental siap melayani dimanapun berada. tapi sekali lagi harus diiringi dengan SOP, mekanisme, evaluasi & monitoring yang jelas,” pungkasnya

# Habib Aboe Minta Polri Bertindak Tegas terhadap Penimbun Masker & Handsanitizer

Penimbunan masker disaat wabah seperti ini adalah tindakan yang tidak dapat dibiarkan dan harus ditindak tegas, karena berpotensi untuk memperparah pesebaran Covid-19”

## HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI,

Anggota Komisi III DPR RI

Banjarmasin (22/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsy mengapresiasi dikeluarkannya Maklumat Kapolri Mak/2/III/2020 sebagai salah satu langkah menekan penyebaran Covid-19.

Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe, maklumat yang berisi tentang tidak melakukan kegiatan di tempat keramaian terbukti cukup efektif, dipraktikkan di berbagai negara.

"Saya mengapresiasi langkah Kapolri, yang langsung mengeluarkan maklumat untuk tidak beraktivitas di luar rumah terutama di tempat keramaian," ungkapnya.

Dalam maklumat tersebut, lanjut Habib Aboe, Kapolri juga melarang adanya pembelian

barang berlebihan atau melakukan penimbunan.

"Hal ini penting, agar tidak terjadi panic buying, dan menjaga suasana kondusif di masyarakat", imbuhnya.

Apresiasi lain, yang disampaikan Bendahara Fraksi PKS ini yakni langkah sigap Polri dalam mengungkap penimbun masker.

"Penimbunan masker disaat wabah seperti ini adalah tindakan yang tidak dapat dibiarkan dan harus ditindak tegas, karena berpotensi untuk memperparah pesebaran Covid-19", pungkasnya.

Lebih lanjut Anggota Komisi III DPR RI ini juga minta Kapolri mengambil beberapa langkah strategis, diantaranya :

Pertama, mengingat semakin langka dan tingginya harga hand sanitizer, patut diduga ada pihak pihak tertentu yang memanfaatkan situasi.

"Dalam hal ini, Polri perlu bekerja sama dengan instansi terkait untuk memantau keaslian hand sanitizer di lapangan. Jangan sampai beredar hand sanitizer palsu yang dapat membahayakan masyarakat luas dan tenaga medis", tegasnya.

Kedua, lanjut Habib Aboe, Polri bersama instansi terkait perlu mengambil langkah untuk menjaga ketersediaan bahan pokok, masker dan sanitizer.

"Pada konteks ini Polri dapat membantu distribusi dan melakukan penetrasi pengamanan. Selain itu dapat pula dilakukan langkah taktis agar harga harga barang tersebut tidak melangit, dan dapat terjangkau untuk masyarakat", papar Ketua Majelis Kehormatan Dewan ini.

Ketiga, kata Habib Aboe, atas barang sitaan alat perlindungan diri kesehatan pada kasus penimbunan atau pidana yang lain, saya sarankan diprioritaskan untuk dialokasikan kepada tenaga medis.



Foto dpr.go.id

"Mereka yang selama ini menangani suspect Covid-19 mengalami keterbatasan alat perlindungan diri sehingga membahayakan keselamatan. Terbukti adanya tenaga medis yang dikabarkan meninggal dunia dan anggotanya terparap Covid-19", urainya.

Terakhir atau Keempat,

lanjut Habib Aboe, Kapolri perlu menugaskan Babinkamtibas agar bekerja sama dengan aparat lain untuk membantu program pemerintah dalam penanganan Covid-19, seperti sosialisasi, implementasi social distancing dan meminta warga untuk banyak beraktivitas di rumah

# Nasir Djamil Usulkan Dibentuk Timwas Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19

Pembentukan tim pengawas ini merupakan konsekwensi fungsi DPR dan tanggungjawab moral sebagai wakil rakyat. Tentu saja, diharapkan anggota dewan yang mengisi tim tersebut, berasal dari seluruh komisi

## H. M. NASIR DJAMIL, M.Si.

Anggota Komisi III DPR RI

Aceh (20/03) -- Anggota Komisi Hukum DPR RI M Nasir Djamil mendesak Pimpinan DPR RI agar pada masa sidang ke depan ini membentuk tim pengawas guna memastikan gugus tugas yang dibentuk pemerintah dalam melawan sebaran virus corona berjalan efektif dan berhasil guna.

Harapan itu disampaikan politisi PKS, karena semakin hari situasi di Indonesia semakin memburuk akibat lambatnya kita mewaspadai dan menangani sebaran.

Hingga saat ini, lanjut Nasir Djamil, telah ada 32 warga yang meninggal, 369

yang terinfeksi dan belasan lainnya yang mengalami kesembuhan.

"Pembentukan tim pengawas ini merupakan konsekwensi fungsi DPR dan tanggungjawab moral sebagai wakil rakyat", ujar Nasir Djamil

Menurutnya, tim ini terdiri dari lintas fraksi dan komisi serta dipimpin oleh salah seorang pimpinan DPR.

"Tentu saja, diharapkan anggota dewan yang mengisi tim tersebut, berasal dari seluruh komisi. Begituupun Pimpinan DPR bisa mengusulkan kepada fraksi agar mengirim anggotanya yang

bertugas dan terkait dengan dampak virus corona", pungkasnya.

Misalnya saja, kata Nasir Djamil, komisi ekonomi, dan keuangan, kesehatan dan tenaga kerja, pemerintahan dalam negeri dan luar negeri, serta komisi hukum.

"Tim pengawas ini diharapkan mengawasi kebijakan dan realisasi di lapangan. DPR ingin pandemi corona ini bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak lama", ujar Nasir

Dikatakan, sejak dirinya menjadi anggota DPR, telah banyak dibentuk tim pengawasan. Pembentukan itu sangat dibutuhkan agar pemerintah bisa sukses menjalankan kebijakannya.

"Tentu saja pola kerja tim pengawas ini akan berbeda dengan tim pengawas serupa yang pernah dibentuk, mengingat daya rusak virus corona yang tidak terlihat secara cepat", ujarnya.

Menurut Nasir Djamil, kita yakin tidak ada yang tahu



sampai kapan pandemi corona ini akan berakhir. Karena itu tim pengawas yang akan dibentuk oleh DPR sesuatu yang penting dan mendesak diwujudkan.

"Tim pengawas DPR ini hadir untuk mengawasi dan

membantu pemerintah dalam melawan dan mengakhiri virus corona. Harus ada kolaborasi antara doa dan kerja keras semua lembaga negara", ujar politisi asal Aceh itu.

# Dimiyati Minta Pemerintah Fokus Hadapi Covid 19, Gratiskan Pengobatannya

Pemerintah harus benar-benar serius dalam pemberantas atau pencegahan covid 19 atau virus corona tidak setengah-setengah. Karena ini menyangkut hak bangsa Indonesia, atau hak warga negara. Dimana negara menjamin kesehatan semua warga negara Indonesia

**DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H.,M.H**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten

Pandeglang (20/03) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS asal Dapil I Banten Dimiyati Natakusumah, mendesak Pemerintah agar fokus menghadapi covid 19 diberbagai daerah yang terjadi.

"Bahkan, saya minta pemerintah menggratiskan setiap yang cek up corona dan pengobatannya juga, bila terjangkau bagi warga negara Indonesia." tandas Dimiyati Natakusumah kepada media, Kamis (19/03/2020).

Menurut Dimiyati mantan Bupati Pandeglang dua periode

ini, pemerintah harus benar-benar serius dalam pemberantas atau pencegahan covid 19 atau virus corona tidak setengah-setengah.

"Karena ini menyangkut hak bangsa Indonesia, atau hak warga negara. Dimana negara menjamin kesehatan semua warga negara Indonesia," kata Dimiyati.

Dikatakannya, bila ingin segera tuntaskan virus corona di Republik tercinta ini, yaitu dengan menjamin dan menggratiskan bagi yang mau cek up dan pengobatan setiap

warga negara. "Saya melihat banyak masyarakat yang tidak punya BPJS." ujarnya.

Selanjutnya, Dimiyati juga mengapresiasi para petugas medis.

"Kita sangat mengapresiasi para petugas medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi covid 19. Mereka adalah pahlawan bangsa ini," tutup Dimiyati.





## TEROPONG PARLEMEN AWARD 2020



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



# Selamat & Sukses

Atas Anugerah dalam Teropong Parlemen Award  
pada Senin, (16/3/2020)



Fraksi PKS DPR RI sebagai **Fraksi Teraspiratif**



Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, MA  
dengan kategori **'Star of parliament'**



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Dr. H. Mardani, M.Eng  
dengan kategori **'Making News Person'**

**Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T**  
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

# Akhir Reses, Hermanto Kunjungi Petani Pengelola Agrowisata Durian

"Selama ini yang kita ketahui, agrowisata durian dikelola oleh pengusaha. Tetapi ternyata ada juga petani yang mampu mengelolanya, Salut untuk kelompok tani Serba Usaha. Semoga menginspirasi kelompok-kelompok tani lainnya untuk durian dan berbagai jenis tanaman lainnya.

**Dr. HERMANTO, S.E., M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

Kabupaten Solok (20/03) — Anggota Komisi 4 DPR Hermanto, dalam perjalanan resesnya di dapil menyampaikan diri mengunjungi kelompok tani Serba Usaha di Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kelompok tani ini mengelola Agrowisata Durian di lahan seluas 40 hektar.

"Selama ini yang kita ketahui, agrowisata durian dikelola oleh pengusaha. Tetapi ternyata ada juga petani yang mampu mengelolanya", papar Hermanto.

"Salut untuk kelompok tani Serba Usaha. Semoga menginspirasi kelompok-kelompok tani lainnya untuk durian dan berbagai jenis tanaman lainnya", tambah legislator dari FPKS ini.

Anjung, ketua kelompok tani Serba Usaha, mengungkapkan bahwa usaha agrowisata ini sudah dirintis sejak tahun 1989.

"Semua jenis durian lokal yang saya dapatkan, bibitnya ditanam disini. Saya bangga dengan durian lokal. Durian lokal lebih manis dibandingkan

durian impor", paparnya.

Menurutnya, musim panen durian di kebunnya terjadi 3 kali dalam setahun. Durian tidak saja dijual di lokal Sumatera Barat. "Durian dikirim juga ke luar daerah bahkan diekspor ke Malaysia dan Belanda", ujarnya.

"Agrowisata durian di Bogor, saat duriannya tidak sedang berbuah, saya kirim durian juga kesana", pungkasnya.

Diakhir kunjungan, Hermanto dan rombongan didaulat mencicipi rasa berbagai jenis durian yang ada di lokasi agrowisata tersebut.



# Permintaan Kopi Arabika Dunia Semakin Tinggi

Jakarta (18/03) — Permintaan atas jenis kopi arabika terus meningkat di dunia dibandingkan jenis robusta. Jenis arabika sangat difavoritkan penikmat kopi dunia. Harganya pun jauh lebih tinggi daripada robusta.

Melihat fakta konsumsi kopi dunia meningkat, Kementerian Pertanian (Kementan) pun merilis penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi para petani kopi sebesar Rp 3,96 triliun.

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin mendukung penyaluran KUR ini, seraya mengawasi penyalurannya dengan ketat.

"Saya sangat mendukung untuk membantu peningkatan kualitas dan perlindungan biji kopi lokal," tulisnya dalam kepada Parlemenaria, Senin (16/03/2020).

Menurut Hamid, tanaman kopi arabika hanya cocok ditanam di dataran tinggi (lebih dari 600 meter di atas permukaan laut). Ini jadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.

"Hingga saat ini belum ada pengembangan dan penelitian yang menghasilkan jenis kopi arabika di daerah dataran rendah," jelas Hamid.



Memang saat ini adalah momen tepat Indonesia mengembangkan kualitas kopi yang dimulai dari seleksi bibit unggulnya, teknologi budidayanya, teknologi pasca panenya, termasuk pemasarannya

**Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

Saat ini, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, produksi kopi Indonesia sekitar 650 ribu ton yang sepertiganya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Produksi kopi masih stagnan, karena belum ada inovasi baru yang dikembangkan. Para petani kopi juga belum banyak mendapat akses teknologi untuk mengembangkan produksinya.

Kementerian Perdagangan merilis laporan, konsumsi kopi dunia pada tahun 2018, sebesar 9,7 juta ton. Tren konsumsi dunia selama lima tahun terakhir memiliki peningkatan dengan rata-rata 2,1 persen per tahun," ungkap Hamid.

Dengan rencana penyaluran KUR, diharapkan semua problem pengembangan kopi bisa dipecahkan dengan memberi akses teknologi dan pasar, sehingga produksi kopi kian mening-

kat, terutama jenis arabika.

Menyangkut dua varian kopi, arabika dan robusta, Indonesia juga punya kekhasan produk kopi berdasarkan daerahnya. Dunia Internasional telah mengenal kopi terbaik dari Indonesia antara lain kopi Jawa, kopi Toraja, kopi Gayo, kopi Sidikalang, kopi Lintong, kopi Wamena, dan kopi Luwak. Dari sisi produksi kopi terbaik dunia, Indonesia menempati urutan keempat setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia.

"Memang saat ini adalah momen tepat Indonesia mengembangkan kualitas kopi yang dimulai dari seleksi bibit unggulnya, teknologi budidayanya, teknologi pasca panenya, termasuk pemasarannya," imbuh legislator dapil Jawa Tengah VI ini.

Kini komoditas kopi harus menjadi bagian dari stimulus bantuan pemerintah selain beras, perikanan, sapi, garam, gula, dan beberapa komoditas hortikultura lainnya.

Merebaknya Covid-19,

# Andi Akmal Minta Pemerintah Beri Jaminan Pangan Masyarakat

Keselamatan dan Kesehatan manusia ini lebih penting ya di dibandingkan dengan penyelamatan ekonomi. Ini khusus kejadian saat ini dimana kita menghadapi situasi yang sangat pelik akibat pandemi covid-19. Itu Dollar dan kertas saham tidak bisa dimakan

**Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M.**

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (19/03) — Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, di tengah kejadian luar biasa Pandemi Covid-19 meminta kepada pemerintah untuk memberi perhatian kepada jaminan ketersediaan bahan pokok selain upaya penyelesaian dan penanganan wabah ini.

"Keselamatan dan Kesehatan manusia ini lebih penting ya di dibandingkan dengan penyelamatan ekonomi. Ini khusus kejadian saat ini dimana kita menghadapi situasi yang sangat pelik akibat pandemi covid-19. Itu Dollar

dan kertas saham tidak bisa dimakan", tukas Andi Akmal.

Sejak kemaren, kata politisi PKS ini, nilai mata uang kita terdepresiasi cukup konstan hingga hari ini, dari 15 ribu rupiah lebih kemaren, hari ini 19 Maret 2020 sudah menembus 16 ribu lebih. Tapi Anggota DPR yang membidangi masalah pangan ini meminta kepada semua pihak, bahwa hari ini waktunya bukan market atau ekonomi lagi sebagai hal utama. Ekonomi dan market saat ini nomor belakangan. Keselamatan dan Kesehatan Manusia serta ketersediaan

pangan cukup untuk bertahan hidup adalah paling utama didahulukan.

Legislator PKS asal Sulawesi Selatan II ini mengatakan, Berapapun biaya yang mesti dipertaruhkan pemerintah untuk survive dari persoalan pandemi corona ini mesti dilakukan.

"Dollar dan saham, lupakan dulu. Kita bicara keselamatan dan kesehatan manusia. Dolar dan kertas saham tidak bisa ngobatin kita atau kita makan. Yang perlu pemerintah jamin adalah ketersediaan bahan pokok. Harga pangan ini mesti tepat jumlah dan harga normal serta kepastian jaminan kesehatan", tegas Akmal.

Andi Akmal meminta kepada pemerintah, jangan terlalu terpengaruh terhadap turunnya bursa saham negara kita yang turun hingga lebih dari 30%. Meski banyak pihak mengatakan ada ancaman kebangkrutan negara, Bahan pokok mahal, persiapan untuk PHK massal, kriminalitas bisa meningkat, namun semua itu baru prediksi. Kita punya Tuhan



yang akan memberi keselamatan selama negara kita berupaya dan berusaha menjadi lebih baik, dan bersumpah untuk menghilangkan kejahatan besar berupa korupsi dan peyelewanngan uang negara.

"Saya berharap, menghadapi situasi berat ini, pemerintah melakukan langkah

yang baik dan bijak dengan tidak melakukan pinjaman ke IMF, Bank Dunia ataupun lainnya. Negara kita selamat dengan kemampuan sendiri, dari aset sendiri, sehingga kekayaan negara kita yang berharga tidak di kuasai Asing", tutup Andi Akmal Pasluddin.

Foto : dpr.go.id

# Anggota DPR RI Himbau BUMN Bersinergi dengan Masyarakat Hadapi Covid-19

“Saya menghimbau Pak Erick Thohir untuk mengerahkan segenap kemampuan BUMN untuk bersinergi dengan masyarakat, agar peran BUMN dapat dirasakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan negara terhadap masyarakat

## Drs. CHAIRUL ANWAR Apt

Anggota Komisi VI DPR RI

Depok (21/03) — Anggota DPR RI Komisi VI Chairul Anwar, meminta agar BUMN bisa bersinergi dengan masyarakat dalam menghadapi Covid 2019, hal ini disampaikan Chairul dalam acara UI PEDULI Covid19 di Kampus UI Depok, Jumat, (20/03/2020).

“Antusias masyarakat dalam menghadapi dampak Covid19 sangat luar biasa, saat ini berbagai kalangan masyarakat bahu membahu berusaha mengerahkan segenap potensi mereka untuk berpartisipasi menghadapi wabah Covid19, kegiatan hari ini salah satunya,” ungkap Chairul yang juga Ketua Umum ILUNI Farmasi UI.

Civitas akademika

Fakultas Farmasi UI, lanjut Chairul, membagikan hand sanitizer ke masyarakat, hand sanitizernya adalah hasil buatan dari mahasiswa Farmasi UI dan menggunakan Laboratorium dan peralatan di Kampus Fakultas Farmasi UI.

Chairul menambahkan bahwa antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya gerakan sosial baik secara online atau offline mengumpulkan segenap potensi yang mereka punya untuk membantu penanganan Covid19.

“Saya menghimbau Pak Erick Thohir untuk mengerahkan segenap kemampuan BUMN untuk bersinergi dengan masyarakat, agar peran BUMN dapat

dirasakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan negara terhadap masyarakat. Munculnya semangat masyarakat harus disambut oleh BUMN untuk bersinergi dengan mereka, BUMN kan mempunyai sumber saya yang cukup besar untuk turut berpartisipasi dengan masyarakat,” himbau Politisi PKS asal Riau ini.

Dari pantauan di lapangan saat ini masih merasakan kekurangan terhadap beberapa alat pelindung diri bagi tenaga medis, masker juga masih langka dan hand sanitizer sangat susah didapatkan di tempat penjualan.

“Kondisi saat ini masih sangat kekurangan di lapangan, masyarakat berusaha membantu dengan sekemampuannya, maka BUMN sangat diharapkan bersinergi bersama masyarakat untuk menghadapi Covid19. Jika itu terjadi di segenap penjuru nusantara maka diharapkan permasalahan Covid19 ini bisa lebih cepat teratasi dan kehidupan masyarakat bisa berangsur normal kembali,” tutup Chairul.



# Wabah Corona Di Indonesia Ibarat Gunung Es, Anggota DPR RI Khawatirkan UMKM

Khusus perhatian pemerintah kepada UMKM menjadi sangat penting karena roda ekonomi negara ini, mayoritas ada di sektor ini. Jadi selain fokus pada penanganan kasus secara langsung, pemerintah sangat perlu membangun instrumen kebijakan melindungi UMKM. Saya sangat yakin, UMKM menjadi andalan dan penyelamat situasi krisis

## Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (15/03) — Anggota DPR RI Komisi VI, Nevi Zuairina menilai wabah covid-19 atau yang biasa disebut wabah virus corona ibarat gunung es, dimana fenomena yang tampak masih sedikit, padahal yang tidak terlihat sangatlah besar. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia yang dilaporkan per 11 maret 2020 sebanyak 35 paseien, sehari kemudian 12 maret 2020 menjadi 69 orang

atau hampir 2 kali lipat.

Politisi PKS ini menganggap, data terlaporkan ini ibarat puncak gungung es, padahal patut diduga masih sangat besar kasus yang tidak terlaporkan sehingga perlu perhatian serius bagi pemerintah Indonesia.

"Menghadapi wabah corona ini, sangat banyak sekali Pekerjaan Rumah bagi pemerintah untuk dapat dipersiapkan

segala sesuatunya. Mulai dari aspek perdagangan dan pengendalian mata uang; Masalah pariwisata dan transportasi; pengelolaan Pendidikan; protokol kerja di rumah; Penyiapan Rumah Sakit yang mumpuni; Persoalan pangan, distribusi dan logistik; penjagaan daya beli masyarakat dan Stabilisasi UMKM", ujar Nevi

Menurut Legislator Sumatera Barat II ini, penanganan wabah corona ini sangat integrated. Tidak dapat parsial sehingga perlu melibatkan hampir seluruh anggota kabinet dan jajaran pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten kota.

Anggota DPR yang juga ketua forum UMKM se Sumatera Barat ini meminta secara khusus kepada pemerintah untuk memberi perhatian yang lebih kepada pelaku UMKM. Ia sudah melihat ada upaya kemudahan dari OJK untuk UMKM terkait kemudahan pembayaran utang untuk pengusaha di sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM)



dalam bentuk menunda pelunasan pokok hutang dalam waktu dekat. Selain itu, restrukturisasi kredit bagi UMKM dari perbankan juga sangat membantu status kredit UMKM yang dapat kembali lancar.

"Saya sangat berharap, pemerintah mampu menyelesaikan persoalan corona seperti Vietnam. Negara Vietnam mengklaim semua pasien yang terinfeksi COVID-19 yang berjumlah 16 orang, telah dinyatakan sembuh 100% dan keluar dari rumah sakit" Ujar Nevi

Anggota Fraksi PKS ini masih sangat khawatir, terhadap virus corona yang mulai masif di Indonesia

bahkan BIN memprediksi memuncak di bulan puasa. Padahal, menurut dia, sektor UMKM sangat gencar dalam aktivitas ekonomi dan ibadah pada bulan Ramadhan.

"Khusus perhatian pemerintah kepada UMKM menjadi sangat penting karena roda ekonomi negara ini, mayoritas ada di sektor ini. Jadi selain fokus pada penanganan kasus secara langsung, pemerintah sangat perlu membangun instrumen kebijakan melindungi UMKM. Saya sangat yakin, UMKM menjadi andalan dan penyelamat situasi krisis", tutup Nevi Zuairina

# PKS: Hentikan Ekspor Konsentrat Tambang

Pemerintah harus berani menghentikan ekspor konsentrat tambang. Sebab semua sudah diatur dalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah, termasuk soal jangka waktu kompensasi penerapan kebijakan ini,

**Dr. H. MULYANTO, M.Eng.**

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Inbang

Tangsel (16/03) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Mulyanto minta Pemerintah hentikan izin ekspor konsentrat tambang segera.

Kebijakan pemerintah yang memberikan izin ekspor konsentrat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4, Tahun 2009, tentang Pertambangan Minerba.

Pasal 103 ayat 1, Undang-Undang Nomor 4, Tahun 2009, mengamanatkan setiap perusahaan tambang harus melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri sebelum diekspor. Hal ini ditetapkan sebagai upaya memberi nilai tambah produk ekspor sekaligus membuka lapangan

kerja baru di dalam negeri.

"Pemerintah harus berani menghentikan ekspor konsentrat tambang. Sebab semua sudah diatur dalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah, termasuk soal jangka waktu kompensasi penerapan kebijakan ini," tegas Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini menilai selama ini Pemerintah terkesan tidak serius melaksanakan Undang-Undang.

Bukannya memaksa perusahaan tambang melaksanakan ketentuan, yang ada malah beberapa kali Pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengizinkan perpanjangan ekspor konsentrat.

Mulyanto mencontohkan,

terhadap PT. Freeport Indonesia, Pemerintah begitu longgar menerapkan larangan ekspor konsentrat. Sejak ada peraturan pelarangan ekspor konsentrat tahun 2014 Pemerintah terbukti beberapa kali memberikan izin. Alasannya proses pembangunan smelter yang belum selesai.

Menurut Mulyanto harusnya Pemerintah mendorong Freeport mempercepat proses pembangunan smelter bukan malah memperlonggar izin ekspor.

"Freeport Indonesia sendiri sudah mengoperasikan fasilitas pemurnian tembaga pertama di Indonesia yang mampu mengolah 300 ribu ton/tahun atau sebesar 40% dari total produksi konsentrat tembaga. Sementara sebanyak 60% lainnya diekspor dalam kondisi mentah", pungkasnya.

Sementara pembangunan smelter baru untuk mengolah sisa konsentrat tembaga yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah tersebut baru terealisasi sebesar 4,8%.

alam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Freeport mentargetkan pembangunan smelter baru



akan selesai tahun 2023. Waktu yang sangat lama menurut Mulyanto.

"Sebab jika dihitung sejak adanya ketentuan pelarangan ekspor tembaga mentah tahun 2014, harusnya di tahun 2020 atau 6 tahun setelah kebijakan tersebut ditetapkan, semua pabrik pengolahan konsentrat sudah siap", ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Mulyanto, Pemerintah harus mengawal kesiapan perusahaan membangun smelter. Jika perlu dibuat satgas khusus untuk mengawasi perkembangan proses pembangunan smelter agar target waktu pembangunan

sesuai dengan rencana.

"Proses pembangunan smelter jangan dilepas begitu saja. Ssbab semakin lama pembangunan ini selesai maka semakin banyak potensi pendapatan negara yang hilang. Kalau terus seperti ini maka wajar kalau DPR menduga ada kepentingan pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan dari proses mengulur-ulur waktu pembangunan smelter," tandas Mulyanto.

Untuk itu Revisi UU Pertambangan Minerba, jangan sampai mengulangi kesalahan UU sebelumnya, terkait hilirisasi ini. Foto : dpr.go.id

# Pembangunan Tersendat, Saadiah Minta PLN Selesaikan Infrastruktur PLTMG Namlea

PLTMG Di Desa Laala Namlea Kabupaten Buru produksi listriknya 10 MW. Kalau beroperasi bisa melayani kebutuhan listrik satu kabupaten Buru”

## SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Maluku

Ambon (18/03) — Anggota Komisi VII DPR, Saadiah Uluputty, meminta kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memberi perhatian serius atas penyelesaian Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLTMG) di Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

Permintaan itu disampaikan oleh Saadiah seusai meninjau langsung pembangunan PLTMG Namlea dalam kunjungan reses di Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

Anggota DPR RI Dapil Provinsi Maluku ini menandakan, PLTMG yang sementara dalam tahapan penyelesaian, berkapasitas 10 MW.

Proyek pembangunan

PLTMG di Namlea merupakan rangkaian dari 15 proyek kelistrikan pendukung pembangunan program 35.000 MW.

Penyelesaian pembangunan PLTMG Namlea terang Saadiah, akan memberi dampak sangat positif terhadap pelayanan kelistrikan di Kabupaten Buru.

“PLTMG Di Desa Laala Namlea Kabupaten Buru produksi listriknya 10 MW. Kalau beroperasi bisa melayani kebutuhan listrik satu kabupaten Buru”, jelas Politisi PKS ini kepada wartawan di Ambon, Selasa, (17/03/2020).

la melanjutkan, Kabupaten Buru saat ini didorong untuk menjadi penyangga

ketersediaan pangan di Maluku. Maka daya dukung kelistrikan dibutuhkan untuk mendorong Buru bergeliat sebagai lumbung pangan.

“Kita harap sentra-sentra produksi pangan bisa semakin produktif dengan adanya elektrifikasi yang baik”, tegas Saadiah.

Selain itu, Saadiah menuturkan, Kabupaten Buru saat ini sedang mengembangkan potensi-potensi yang kompetitif, salah satu diantaranya ada pada sektor perikanan.

Menurutnya PLTMG Namlea jika selesai pembangunan dan beroperasi akan membantu penyediaan listrik untuk operasionalisasi cold storage – cold storage di kabupaten tersebut.

“Produksi perikanan di Buru akan bergairah jika cold storage beroperasi. Ada nilai tambah bagi kesejahteraan nelayan tentunya”, papar Saadiah.

Dalam temuannya, progres pembangunan infrastruktur listrik PLTMG Namlea masih



cukup rendah, baru pada capaian 12%. Padahal rencana pembangunan PLTMG Namlea seharusnya selesai pada tahun 2019.

“Rencana Penyelesaian PLTMG harusnya 2019. Namun hingga sekarang, progresnya baru 12%. Ini sangat memprihatikan”, sesal Saadiah.

la menyebut, ada beberapa factor yang menjadi penyebab penyelesaian PLTMG jalan di tempat. Yang pertama sebut Saadiah, pembangunan PLTMG harus menunggu material yang dipesan dari pulau Jawa.

“Mobilisasi material membutuhkan waktu hingga

sampai lokasi pembangunan”, paparnya.

Yang kedua lanjutnya, Supporting anggaran untuk penyelesaian PLTMG Namlea tersendat. “Daya dukung alokasi anggaran tersendat”, sebut Saadiah.

Padahal, PLTMG Namlea merupakan satu diantara proyek pembangkit listrik yang masuk dalam Pembiayaan Investasi dengan Jaminan Pemerintah untuk pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG).

Selengkapnya di fraksi.pks.id

# Kasus Positif Covid-19 Bertambah, Iskan: Jangan Abaikan Fatwa Ulama!

Penting bagi kita melaksanakan seluruh anjuran dari para stakeholder, agar kita harus menjaga social distancing dan physical distancing, agar tetap berada dirumah. Tujuan seluruh kantor dan sekolah di liburkan, agar meredam merebaknya wabah ini.

## H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (21/03) — Anggota komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis menghimbau kepada masyarakat agar saat-saat seperti ini, mengikuti anjuran dari para stakeholder dalam rangka penuntasan masalah covid-19 di Indonesia.

Perlu diketahui, saat ini kasus positif covid-19 di Indonesia sudah mencapai lebih dari 300 kasus, dan berpotensi akan terus bertambah.

“Penting bagi kita melaksanakan seluruh anjuran

dari para stakeholder, agar kita harus menjaga social distancing dan physical distancing, agar tetap berada dirumah. Tujuan seluruh kantor dan sekolah di liburkan, agar meredam merebaknya wabah ini.” Tegus Iskan.

Kemudian, lanjut Iskan, terkait fatwa ulama tentang larangan shalat berjamaah di wilayah red zone, juga harus kita patuhi.

“Kita jangan sampai masuk dalam perdebatan masalah fiqh. Bahkan Ulama-

ulama Arab Saudi juga menangguhkan sementara shalat berjamaah di semua mesjid selain masjid haram dan mesjid nabawi untuk sementara waktu, menganjurkan agar rakyatnya shalat dirumah masing-masing agar memutus rantai penularan wabah ini,” tegas Iskan.

Apalagi keputusan ini sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

“Saran saya, jangan kita abaikan fatwa ulama, Ini kan imbauan MUI juga sudah jelas fatwanya, kemudian para ahli juga demikian jadi PKS menganjurkan mengikuti fatwa MUI dan juga mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Karena itu untuk menjaga keselamatan manusia secara bersama-sama kan, Hal ini bertujuan untuk mencegah semakin banyak penularan virus corona (Covid-19) karena orang berkumpul pada tempat yang sama.” Pungkas Iskan.



Dilain sisi, iskan juga menjelaskan bahwa ini dikembalikan kepada masyarakat.

“Ini bersifat himbauan, dan dikhususkan untuk kawasan wabah red zone, jadi bagi yang kontra terhadap fatwa tersebut, sebaiknya tetap ikuti protokol kesehatan yang telah

ditetapkan, jika keluar rumah, masyarakat dihimbau agar tetap waspada untuk tetap jaga diri, jaga jarak aman interaksi, dan selalu menjaga kebersihan, cuci tangan, jika perlu gunakan hand sanitizer dan masker bagi yang memerlukan sebagai langkah antisipasi atau berjaga-jaga” tutup iskan ]

## Status Bencana Corona Dilimpahkan ke Daerah

# Bukhori: Presiden Terkesan Cuci Tangan

Berkaca dari perkembangan terkini kasus Corona, saya menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan tidak siap, bahkan gagap dalam menghadapi penyebaran virus Corona

### **KH. BUKHORI, Lc., M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (16/03) - Pasca ditetapkannya wabah corona sebagai pandemi oleh WHO, Presiden Jokowi meminta kepada kepala daerah untuk dapat menentukan status daerah yang dipimpinnya terkait dengan penyebaran virus corona.

Presiden Jokowi juga meminta agar kepala daerah berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ihwal rencana penetapan status wilayahnya tersebut. Namun, langkah Presiden tersebut menuai sejumlah kritik.

Salah satu kritikan tajam datang dari Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf. Bukhori memandang bahwa Presiden Jokowi bertanggungjawab penuh mengambil alih komando dalam penanganan kasus Covid-19.

la menambahkan, Presiden Jokowi perlu menjadi garda terdepan dalam memberi kepastian rasa aman bagi publik di tengah situasi genting sehingga peran komando ini seyogyanya dilakukan oleh figur setingkat Presiden, bukan Menteri apalagi Kepala Daerah.

"Jauh sebelum situasi ini terjadi (red; 27 Februari 2020), kami telah mengingatkan pemerintah agar siaga dalam menghadapi ancaman Covid-19 mengingat situasi global saat itu mulai mengkhawatirkan, tetapi sangat disayangkan bahwa masih ada sebagian pihak yang justru mem-bully sikap kami kala itu. Namun, kami mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang akhirnya mengambil tindakan, tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020, dengan memberikan keterangan pers perihal kesimpang-

siuran informasi Zero Case Corona di Indonesia. Akhirnya, dengan segala keprihatinan, terbukti bahwa ada dua warga negara Indonesia yang positif terjangkit virus Corona saat itu", ungkap Bukhori di sela kegiatan reses di Semarang, Minggu (15/03).

Lebih lanjut, Bukhori juga menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang terkesan "cuci tangan" dengan melimpahkan status bencana Corona ke daerah.

la menghimbau agar kepala daerah tidak dibiarkan memberikan ijhtihad-nya masing-masing dalam merespon penyebaran virus yang semakin meluas ke sejumlah kota di Indonesia. Menurutnya, harus ada arahan jelas dan komando yang terukur dan terpusat dari Presiden dengan tetap memperhatikan tindakan preventif sebagai upaya mitigasi meluasnya bencana

"Berkaca dari perkembangan terkini kasus Corona, saya menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan tidak siap, bahkan gagap dalam menghadapi penyebaran virus Corona," pungkasnya.

Sederhananya, lanjut Bukhori, lihat betapa rapuhnya sistem deteksi dini di istana



sehingga berakibat salah satu Menteri positif terjangkit Corona.

"Artinya, dengan menimba- ng kejadian tersebut, sepatut- nya Presiden menarik kembali keputusannya untuk menyerah- kan status bencana Corona ke masing-masing daerah dan

mulai mengambil alih komando secara terpusat. Sebab, penan- ganan penyebaran virus Cor- na membutuhkan pendekatan integralistik antar wilayah meng- ingat interaksi antar manusia begitu luas dan multi segmen" pungkask politisi PKS ini.

# Antisipasi Merebaknya Covid-19, Aleg PKS Minta Pimpinan DPR Rapat Bersama Kemenkes

Pemerintah perlu melakukan langkah antisipasi dengan menyiapkan subsidi kepada pekerja non formal seperti driver ojek online (ojol), buruh, tukang bakso dan lainnya para Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBU) dan Bukan Pekerja (BP) untuk mengantisipasi dan menghindari gejala sosial yang ada

## H. ANSHORY SIREGAR, Lc

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Jakarta (20/03) — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Anshory Siregar, menyampaikan sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan, dalam upaya penanganan Covid-19.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat badan musyawarah (Bamus), bersama pimpinan DPR RI secara online, Jumat (20/03/2020).

Pertama, Anshory meminta Pimpinan DPR RI untuk segera mengagendakan rapat Komisi IX dengan Kementerian Kesehatan.

"Rapat koordinasi Penanganan merebaknya Covid-19 perlu dilakukan, untuk menyiapkan segera gedung maupun ruang isolasi yang standar dengan dilengkapi dengan alkes, masker, APD dan obat-obatan", ungkap Anshory.

Kedua, lanjut Anshory, Pimpinan DPR harus bisa memastikan bahwa seluruh Pasien covid-19 sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ditanggung sepenuhnya oleh BPJS

Kesehatan.

"Pemerintah perlu melakukan langkah antisipasi dengan menyiapkan subsidi kepada pekerja non formal seperti driver ojek online (ojol), buruh, tukang bakso dan lainnya para Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBU) dan Bukan Pekerja (BP) untuk mengantisipasi dan menghindari gejala sosial yang ada", tutup Anggota Fraksi PKS DPR ini.

Foto : dpr.go.id



# Netty Ajak Masyarakat Bangkit Membangun Gerakan Sadar Covid-19

Tenaga medis di rumah sakit dan klinik adalah garda terdepan yang dengan dedikasi tinggi berjuang di hari-hari sulit ini melawan Covid-19. Dukungan berupa penyediaan alat, bahan dan bahkan pemberian insentif lebih adalah hal yang harus dilakukan,"

## Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (18/03) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani meminta masyarakat untuk lebih peduli kesehatan, terutama saat merebaknya virus Corona atau Covid-19.

"Langkah yang tepat guna membangun kewaspadaan tinggi terhadap dampak buruk yang akan timbul. Negara harus berperan optimal guna melindungi rakyat dari bencana yang lebih luas," ujar Netty Prasetiyani, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Rabu, (18/3)

menanggapi masa perpanjangan keadaan bencana nasional akibat penyebaran Covid-19 hingga 29 Mei 2020.

Dalam kesempatan tersebut, Netty meminta pemerintah memberikan dukungan penuh kepada seluruh rumah sakit, klinik dan tenaga medis dalam melaksanakan tugasnya.

"Tenaga medis di rumah sakit dan klinik adalah garda terdepan yang dengan dedikasi tinggi berjuang di hari-hari sulit

ini melawan Covid-19.

Dukungan berupa penyediaan alat, bahan dan bahkan pemberian insentif lebih adalah hal yang harus dilakukan," tandasnya.

Tidak lupa, Netty pun memberikan dukungan moril dan mendoakan agar perjuangan ikhlas mereka mendapat balasan yang besar dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Selain itu, kata Netty, "Pemerintah perlu lakukan penutupan sementara semua tempat yg berpotensi menjadi lokasi berkumpulnya massa, seperti tempat wisata, hiburan dan perkantoran," ujarnya.

Terkait wilayah sebaran Covid-19 yang semakin bertambah, Netty meminta pemerintah melakukan pencegahan atau pembatasan mobilisasi warga keluar dari dan masuk ke lokasi terjangkit.

"Sudah saatnya warga diinstruksikan berdiam di rumah untuk self isolation. Bekerja, belajar dan beribadah dari rumah," kata Netty.

Tujuan berdiam di rumah,



kata Netty, adalah untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

"Jadi siswa diilburkan agar benar-benar di rumah dan tidak melakukan interaksi sosial di luar. Jangan malah jalan-jalan ke tempat keramaian seperti ke mall, pusat hiburan atau wisata. Jika tidak sekolah tapi tetap keluar rumah, ya percuma saja," ujarnya.

Terakhir, Netty mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu membahu

membangun gerakan sadar Covid-19.

"Ini menjadi persoalan bangsa yang harus dihadapi bersama. Semua elemen masyarakat harus bergerak. Tokoh masyarakat harus hadir bersama lakukan pencegahan penyebaran Covid-19. Gereja, mesjid, vihara, posyandu, PKK, Karang Taruna, ormas, harus menjadi garda terdepan dalam kampanye gerakan sadar Covid-19," tutup Netty.

# Meningkatnya Covid-19, Komisi IX DPR Dorong Pemprov Jabar Lengkapi Sarana RS

Kesiapan Dinkes Jabar juga sudah cukup baik. Dari data-data yang masuk ke Jabar Command Center ini lah nantinya yang akan menjadi dasar pengambilan kebijakan Dinkes Jabar atau Pemprov Jabar,"

**dr. H. ADANG SUDRAJAT, M.M.,Av.**

Anggota Komisi IX DPR RI

Bandung (20/03) — Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Dinas Kesehatan untuk terus melengkapi sarana rumah sakit (RS) dalam penanggulangan bencana Covid-19.

Menurut Adang, masih banyak kekurangan yang perlu dilengkapi rumah sakit di Jawa Barat menghadapi wabah Virus Corona ini.

"Daripada nanti kita susah dalam menanggulangi jika terjadi peningkatan kasus Corona ini, lebih baik kita antisipasi dari awal. Di

antaranya dengan terus menambah sarana kelengkapan rumah sakit dalam mengantisipasi wabah Corona," kata Adang saat meninjau Jabar Command Center, Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (20/03/2020).

Adang menjelaskan kunjungannya ke Jabar Command Center ini dalam rangka meninjau kesiapan Pemprov Jabar dalam tataran kebijakan, setelah sebelumnya ia mengunjungi beberapa rumah sakit daerah di Jawa Barat untuk memonitor kesiapan dari tataran teknis.

Anggota DPR RI asal Dapil

Jabar II ini melihat di Jabar Command Center, data tentang Covid-19 terus update mulai dari dunia sampai ke tingkat daerah di Jawa Barat.

"Kesiapan Dinkes Jabar juga sudah cukup baik. Dari data-data yang masuk ke Jabar Command Center ini lah nantinya yang akan menjadi dasar pengambilan kebijakan Dinkes Jabar atau Pemprov Jabar," papar Adang.

Hal ini menurut Adang sangat diperlukan agar jangan sampai wabah Corona ini makin merusak tatanan masyarakat Jawa Barat.

"Daripada repot di kemudian hari dalam penanggulangannya, lebih baik kita antisipasi betul sedari awal," ujar anggota Fraksi PKS DPR RI ini.

Adang mengatakan di Jawa Barat sudah ada delapan rumah sakit rujukan pasien Corona dan 19 rumah sakit tambahan yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

la berpesan kepada



Dinkes Jabar terhadap rumah sakit rujukan dan tambahan tersebut untuk menambah perlengkapan dalam menangani pasien Covid-19.

"Saya lihat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini masih kurang kapasitasnya meski sudah mencapai 1.000 tempat tidur untuk penanganan

pasien Covid-19 se-Jawa Barat. Malah yang lebih besar itu Rumah Sakit Rotinsulu Bandung. Saya berpesan agar fasilitasnya ditambah dari hari mengingat tingkat infeksi Covid-19 di Jawa Barat masih tinggi," ujar anggota Komisi IX DPR RI ini.

# Mufida: Lindungi Tenaga Medis COVID-19, Cukupkan Kebutuhan APD dan Asupan Nutrisi

Wabah ini terus meluas, jumlah pasien yang harus ditangani juga semakin meningkat. Para dokter dan tenaga medis ini sangat dibutuhkan di tengah kondisi wabah yang sudah dinyatakan oleh pemerintah sebagai bencana nasional ini

## Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (18/03) — Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati prihatin dengan kekurangan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para dokter dan petugas medis yang berjibaku menangani pasien suspect maupun positif Corona (COVID-19) di berbagai rumah sakit. Padahal tanpa APD yang memadai, para pejuang ini rentan terpapar virus penyebab pandemi global ini.

Mufida menyampaikan keprihatinannya tersebut usai kegiatan reses bersama beberapa tenaga kesehatan yang bertugas di lapangan

menangani pasien suspect maupun positif COVID-19.

"Wabah ini terus meluas, jumlah pasien yang harus ditangani juga semakin meningkat. Para dokter dan tenaga medis ini sangat dibutuhkan di tengah kondisi wabah yang sudah dinyatakan oleh pemerintah sebagai bencana nasional ini," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Karena itu, lanjut Mufida, jangan sampai ada dokter atau tenaga medis pendukung yang sakit dan turut menjadi korban.

"Kasus meninggalnya satu

orang perawat di salah satu RS akibat terpapar COVID-19 harusnya jadi peringatan akan pentingnya ketersediaan APD ini dan perlindungan bagi para tenaga medis," tandas Mufida.

Mufida menegaskan, jangan sampai bertambah lagi korban. "Saya prihatin mendapat informasi sudah ada dokter yang membantu penanganan wabah ini yang sudah dinyatakan positif COVID-19," imbuh Mufida.

Mufida melanjutkan, APD yang tersedia saat ini semakin menipis jumlahnya dibandingkan yang dibutuhkan. APD mulai dari masker, masker N95, pelindung wajah, pelindung mata, tangan, badan sampai rambut, mutlak dibutuhkan oleh dokter dan paramedis yang menangani langsung pasien COVID-19.

Tak hanya APD, Mufida juga mengingatkan pentingnya dukungan asupan makanan bergizi, ruangan yang layak dan juga tambahan paramedis bagi para dokter dan tenaga medis lain yang berada di garda



terdepan dalam penanganan pasien COVID-19 ini.

"Pemerintah perlu mempertimbangkan tren kenaikan jumlah pasien positif COVID-19 yang penambahannya sudah mengikuti deret ukur unuk diikuti dengan pengerahan tambahan dokter dan paramedis dari berbagai spesialis yang relevan dengan penanganan COVID-19," ujar Mufida.

Di luar minimnya APD yang

dibutuhkan para dokter dan paramedis, Mufida juga menyoroti kurangnya prasarana pendukung yang dibutuhkan oleh pasien suspect maupun positif COVID-19.

"Antara lain ventilator, kamar rawat tekanan negatif untuk isolasi yang jumlahnya juga sedikit di RS Rujukan, yang sangat dikhawatirkan tidak mencukupi ketika jumlah suspect dan positif COVID-19 meningkat seperti yang terjadi saat ini," pungkas Mufida

Pendemik Covid-19

# Saat Reses Alifuddin Minta Pemprov Sediakan Tempat Periksa Gratis

Kami menghimbau ke pemerintah provinsi, kota dan kabupaten untuk aktif menyediakan dan melakukan tempat konsultasi maupun laboratorium pemeriksaan virus corona secara gratis kepada masyarakat yang merasa dirinya terkena gejala virus corona

**H. ALIFUDDIN, S.E.,M.M**

Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Kalbar

Pontianak (16/03) — Semakin merebaknya virus Covid 19 membuat kewaspadaan pemerintah semakin meningkat, hal ini guna mencegah laju mewabahnya Covid 19. Salah satunya perlu disediakan tempat medical check up gratis untuk konsultasi atau pun pemeriksaan awal virus corona.

Hal ini disampaikan oleh Alifuddin, anggota komisi IX DPR RI saat Reses di Kabupaten Mempawah Minggu (15/03).

Selain terus mengkampanyekan perilaku hidup sehat,

pemerintah provinsi, kota dan kabupaten se Kalbar harus gerak cepat untuk mengantisipasi bertambahnya korban.

"Kami menghimbau ke pemerintah provinsi, kota dan kabupaten untuk aktif menyediakan dan melakukan tempat konsultasi maupun laboratorium pemeriksaan virus corona secara gratis kepada masyarakat yang merasa dirinya terkena gejala virus corona," ujarnya.

Alifuddin juga mendukung dengan adanya penutupan tempat keramaian serta libur

sekolah.

"saya mengapresiasi apa yang dilakukan gubernur kalbar meliburkan sekolah untuk menghindari tempat berkumpulnya orang-orang," tambahnya

Menurut Alifuddin, tindakan yang saat ini paling efektif bisa dimulai dari diri kita sendiri, perilaku hidup sehat seperti memakan buah buahan, cuci tangan serta juga tidak keluar rumah kecuali untuk keperluan yang mendesak bisa mencegah meluasnya covid 19.



**Musibah Covid-19,**

# Fahmy Alaydroes Ajak Masyarakat Disiplin Hidup Bersih dan Sehat

Musibah Covid-19 ini, sebaiknya dijadikan momentum bagi pemerintah daerah untuk mengajak dan mendisiplinkan masyarakat membiasakan hidup bersih dan sehat. Masih banyak wilayah pemukiman yang kumuh, tempat pembuangan sampah yang tidak semestinya, warung-warung makan yang kurang memperhatikan kebersihan

**Dr. H. FAHMY ALAYDROES, M.M.,M.Ed**

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (21/03) — Musibah merebaknya virus Corona baru atau Covid-19, yang menyebar cepat di beberapa negara termasuk Indonesia, menjadi perhatian Anggota DPR RI Fraksi PKS Fahmy Alaydroes.

Menurut Fahmy, musibah virus ini harus disikapi dengan langkah-langkah yang sigap dan benar, sesuai standar kesehatan.

"Sosialisasi serta edukasi

yang efektif ke tengah-tengah masyarakat sangat perlu dilakukan semua pihak, agar masyarakat sadar, waspada tapi tetap tenang", ungkap Anggota Komisi X DPR RI ini.

Fahmy menambahkan siapapun jangan pernah meremehkan atau menunggu sampai munculnya korban.

"Sudah banyak contoh yang memberikan kita pelajaran, bila lamban bersikap akan

menjadi cepat dan meluas penyebaran dan penularannya, dan bila cepat tanggap dan sigap bersikap, akan segera mereda", tegasnya.

Prinsip pencegahan dan pembatasan penularan, lanjut Fahmy, sebaiknya merujuk kepada standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dan juga para pakar yang kompeten.

Secara umum langkah-langkah utama yang segera diberlakukan antara lain seperti menyiapkan rumah sakit rujukan lengkap dengan ruang isolasi yang memadai jumlah kapasitas atau daya tampung pasien, termasuk ketersediaan perlengkapan medis, alat pelindung diri yang memadai bagi para dokter dan perawatnya," paparnya.

Kedua, kata Fahmy, mengurangi dan membatasi interaksi sosial, menghimbau masyarakat untuk tidak mengunjungi pusat-pusat keramaian bila tidak diperlukan.

"Mengedukasi masyarakat



agar memahami dan menyadari bahaya dan resiko tertular virus ini, dan kemudian mengajak mereka untuk bersama-sama melindungi keluarga dan masyarakat lingkungannya dari resiko terinfeksi Virus covid-19 ini. Ikuti perintah dan anjuran pemerintah dan tokoh masyarakat", pungkasnya.

Musibah Covid-19 ini, kata Fahmy, sebaiknya dijadikan momentum bagi pemerintah daerah untuk mengajak dan mendisiplinkan masyarakat membiasakan hidup bersih dan sehat.

"Masih banyak wilayah-wilayah pemukiman yang kumuh, tempat pembuangan sampah yang tidak semestinya, warung-warung makan yang kurang memperhatikan kebersihan", tutur Anggota DPR asal Jawa Barat ini.

Fahmy melanjutkan, Germas dan PHBS yang selama

ini sudah disosialisasikan, saatnya sekarang dilaksanakan dengan tingkat disiplin yang lebih tinggi, dan bila perlu dipaksa.

Gerakan sterilisasi dengan desinfektan, atau setidaknya membersihkan tempat-tempat umum seperti terminal, stasiun kereta, pasar-pasar, mal, tempat ibadah, majlis taklim, pesantren, sekolah, kantor-kantor pemerintahan sampai ke tingkat desa sebaiknya dilakukan secara bersama dan gotong royong dibawah koordinasi dan fasilitasi pemerintah kabupaten," tandasnya.

Di akhir pernyataannya, Fahmy mengajak para kepala desa, pimpinan ormas, pimpinan parpol, tokoh masyarakat, Ulama, guru dan Kyai diharapkan juga ikut aktif saling membantu dengan pemerintah mengantisipasi wabah Covid-19 ini.

# Anggota DPR RI Kritisi Paket Kebijakan Stimulus Ekonomi Jilid 1 & 2

Stimulus fiskal 1 dikeluarkan pemerintah saat belum ditemukannya kasus virus Corona oleh pemerintah Indonesia di Indonesia. Langkah Stimulus yang berisikan kebijakan di bidang pariwisata ini tidak berjalan mulus dan mendapatkan kritik karena beresiko penyebaran virus Covid 19 di dalam negeri dari turis mancanegara

## Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si.

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (21/03) — Legislator DPR RI, Anis Byarwati, memberikan komentar tentang respon pemerintah terhadap kondisi ekonomi Indonesia di masa pandemi Covid 19.

Anis yang juga Anggota Komisi XI DPR RI mengkritisi langkah pemerintah di bidang ekonomi terkait kebijakan Fiskal 1 dan 2.

Menurut Anis, stimulus fiskal 1 dikeluarkan pemerintah saat belum ditemukannya kasus virus Corona oleh pemerin-

tah Indonesia di Indonesia.

"Langkah Stimulus yang berisikan kebijakan di bidang pariwisata ini tidak berjalan mulus dan mendapatkan kritik karena beresiko penyebaran virus Covid 19 di dalam negeri dari turis mancanegara," ungkapnya.

Kemudian, Anis menambahkan, Stimulus fiskal tahap 2, dikeluarkan pemerintah untuk menyesuaikan dengan ditemukannya kasus Corona di Indonesia.

"Diantaranya relaksasi PPH 21, 22, 25 dan relaksasi restitusi PPN. Dana yang disiapkan pemerintah untuk relaksasi PPH 21 DTP sebesar Rp 8,6 triliun.

dapun mengenai kebijakan penghapusan PPH 21, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa, pemerintah akan menanggung 100 persen PPH pasal 21 pekerja dengan pendapatan sampai dengan Rp. 200 juta per tahun", pungkas Anis.

Menurut Anis yang juga Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, kebijakan ini artinya adalah, pekerja dengan pendapatan hingga Rp 16 juta per bulan akan digratiskan pajak gaji karyawannya, namun tidak berlaku bagi yang bergaji di atas Rp 16 juta perbulan.

Ilustrasinya, jika Karyawan yang sudah menikah dan mempunyai tanggungan dua anak dengan gaji Rp.10 juta per bulan, maka pajak yang ditanggung pemerintah adalah sebesar Rp.193.750 per bulan", urainya.

Dalam kasus ini, lanjut Anis, pajak yang ditanggung pemerintah tidak signifikan



terhadap daya beli karyawan. Sebab lonjakan harga sembako melebihi pajak yang ditanggung pemerintah. Maka, karyawan/penerima upah yang mendapat gaji di bawah Rp.10 juta per bulan tidak mendapatkan dampak yang signifikan terhadap daya beli, karena nilai nominalnya sangat tidak membantu untuk mengimbangi kenaikan harga yang menggila akibat panic buying.

"Sehingga dapat disimpulkan langkah pemerintah menghapus PPH ini tidak terlalu manjur dalam membantu rakyat menghadapi kesulitan ekonomi. Padahal, harga-harga kebutuhan pokok meningkat karena panic buying yang disebabkan sikap pemerintah dalam hal ini Presiden terhadap pandemic Covid 19 dan momen menjelang Ramadhan yang

seharusnya sudah dapat diprediksi karena merupakan momen tahunan," tuturnya.

Sedangkan untuk relaksasi, kata Anis, PPH pasal 22 atas impor sebesar Rp8,15 triliun. Untuk PPH Pasal 25 (potongan angsuran 30%) sebesar Rp4,2 triliun.

"Sedangkan untuk relaksasi restitusi PPN dipercepat sebesar Rp 1,97 triliun. Sehingga total dana yang digelontorkan untuk Stimulus Fiskal Jilid II ini berjumlah Rp 22,92 triliun", imbuhnya

Anis berpendapat bahwa, untuk relaksasi PPH 21 ditanggung pemerintah (DTP) sebaiknya tidak perlu dilakukan. Alasannya karena tidak signifikan membantu menaikkan daya beli rakyat.

Selengkapnya di fraksi.pks.id

# Junaidi Auly Ajak Millennial Bijak dalam Kelola Keuangan

Jika millennial melek keuangan diharapkan akan lebih terampil dalam mengelola keuangan. Dengan meningkatkan edukasi dan literasi keuangan pada kelompok usia ini, diharapkan millennial mulai menyiapkan masa depannya dengan lebih terencana dan didukung oleh kemandirian ekonomi lewat investasi

## Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M

Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Lampung

Lampung (17/03) — Sektor jasa keuangan saat ini telah mengalami berbagai perkembangan terkait akses jasa keuangan, namun diharapkan jasa keuangan bukan hanya sekedar akses, bijak dalam penggunaan jasa keuangan tentunya dapat menjadi perhatian bersama.

Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly mengajak industri jasa keuangan untuk berperan bukan saja dalam pemerataan akses, namun berperan juga

terhadap edukasi terkait bagaimana cara mengelola keuangan dengan bijak.

"Ini bukan sekedar akses jasa keuangan saja, tapi industri harus berperan terhadap aspek-aspek yang bersifat informatif," ungkap Junaidi.

Anggota Fraksi PKS DPR RI juga mengajak generasi millennial untuk bisa melek dalam pengelolaan keuangan. Menurutnya jika millennial melek keuangan diharapkan akan

lebih terampil dalam mengelola keuangan.

"Dengan meningkatkan edukasi dan literasi keuangan pada kelompok usia ini, diharapkan millennial mulai menyiapkan masa depannya dengan lebih terencana dan didukung oleh kemandirian ekonomi lewat investasi," jelas Junaidi dalam agenda Penyuluhan Millennial Bijak Dalam Akses Keuangan Dalam Akses Keuangan bersama OJK Lampung di Bandar Mataram, Lampung Tengah. Senin, (16/03/2020)

Legislator asal Lampung ini melanjutkan, jika millennial Indonesia menjadi generasi melek keuangan, akan berimplikasi pada kualitas analisis termasuk didalamnya pada analisis risiko dan membuat keputusan.

Junaidi mengatakan, sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor penting yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Karenanya ia meminta OJK untuk terus melakukan penyuluhan agar pemahaman



mayarakat terutama pada golongan millennial.

"Diharapkan OJK terus mengoptimalkan kebijakan-kebijakan yang bukan saja memperluas akses jasa keuangan, namun juga harus

aktif dalam memberikan edukasi terkait cara-cara yang bijak menggunakan layanan jasa keuangan," tutup Junaidi



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

# Memperingati Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW

27 Rajab 1441 H

*Tingkatkan Taqwa Kepada Allah  
Tingkatkan Khidmat  
bagi Semesta*

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI



# Anggota Fraksi PKS Berikan Bantuan Masker dan Hand Sanitizer ke RS Polri Kramat Jati

Pihak RS Polri Said Sukanto Kramat Jati sangat mengapresiasi dan berterimakasih atas perhatian para legislator dari Fraksi PKS ini dan menitipkan nomor kontak untuk para pihak yang juga berkenan memberikan bantuan melalui AKBP Ratna.

Jakarta (22/03) — Berawal dari kepedulian terhadap pihak-pihak yang berjuang di garis depan melawan pandemic virus Corona-19, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati memberikan perhatian dan dukungannya.

Anis mengunjungi RS Polri Kramat Jati dan bersilaturahmi dengan rekan-rekan paramedis disana. Kunjungan yang disambut dengan baik, diterima oleh pimpinan RS Polri Kramat Jati, beserta jajarannya.

RS Polri Kramat Jati adalah salah satu dari beberapa rujukan pasien Covid-19 di wilayah Jakarta Timur,

selain RS Persahabatan dan RS. Duren Sawit.

Sejauh ini RS Polri Kramat Jati dengan kapasitas 2 tempat isolasi sudah merawat 20 orang pasien terkait Covid-19, yang terdiri dari 3 pasien berstatus positif, 5 pasien suspect dan sisanya 12 orang pasien dalam pengawasan (PDP).

Dalam kesempatan ini, hadir juga Mardani Ali Sera dan bersama-sama menyampaikan bantuan berupa masker dan hand sanitizer kepada pimpinan RS Polri dr. Rusdianto.

Pihak RS Polri Said Sukanto Kramat Jati sangat mengapresiasi dan

berterimakasih atas perhatian para legislator dari Fraksi PKS ini dan menitipkan nomor kontak untuk para pihak yang juga berkenan memberikan bantuan melalui AKBP Ratna.

Kemudian Dr. Anis Byarwati dan Dr. Mardani melanjutkan kunjungan menemui pengurus Masjid Raya Al Huda di Jl. Cililitan Besar Kelurahan Cililitan dan para Penemudi Ojek Online yang diwakili oleh Rembug Nasional Pengemudi Online (RNPO).

Kepada pengurus Masjid Raya Al Huda dan para pengemudi ojek online ini juga diserahkan sejumlah masker dan hand sanitizer.

Anis berharap aksi kepedulian ini dapat memelopori aksi-aksi kepedulian lainnya, untuk ikut membantu pihak-pihak yang berjuang melayani masyarakat dan pasien Corona.





# Saat Reses, Adang Daradjatun Kunjungi Kampung Gusti, Dengar Keluhan Warga

Saya akan menindak lanjuti dan mengusahakan agar seluruh masalah yang disampaikan dapat diselesaikan

## Drs. H. ADANG DARADJATUN

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta III

Jakarta (22/03) — Diakhir masa reses masa persidangan kedua tahun 2019/2020, Anggota DPR RI Fraksi PKS DPR RI Adang Daradjatun menyapa warga di Lapangan TPI 2, Jalan Kampung Gusti, Kecamatan Penjarangan, Jakarta Utara, Ahad (15/03/2020).

Acara reses kali ini dihadiri AKBP Bambang Yudistira selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara, Indra selaku Kasi Pencegahan BNN Jakarta Utara, Aliyudin Ketua RW 14, Nuryadi Ketua DPRa PKS Pejagalan, Para Ketua RT 01 – RT 12 Se-RW 14, Tokoh Masyarakat dan warga Kampung Gusti.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Bambang selaku Kepala BNN Jakarta Utara menyampaikan himbuan agar pengawasan lingkungan terhadap aktifitas warga yang dicurigai menggunakan/ mengedarkan/ memproduksi narkoba untuk dapat dilaporkan ke BNN.

"Saya mengajak warga untuk menyampaikan jika ada yang melakukan transaksi obat terlarang," ungkapnya.

Sedangkan warga RW 014 juga menyampaikan aspirasinya kepada Anggota DPR RI Fraksi PKS Adang Daradjatun perihal pembangunan jembatan orang yang di tahun 1980-an ada.

"Banyak warga yang mengeluhkan saat ini apabila ingin menyeberang harus berputar cukup jauh dari RW 014," keluh warga.

Dalam sambutannya, Adang Daradjatun yang juga merupakan Wakil Ketua Fraksi PKS bidang Kinerja sangat menerima semua masukan yang disampaikan baik warga, maupun mitra Komisi III yang turut hadir dalam acara ini.

"Saya akan menindak lanjuti dan mengusahakan agar seluruh masalah yang disampaikan dapat diselesaikan," ungkap Mantan Wakapolri ini.



# Gerak Cepat Atasi Corona, Rofik Hananto Berikan Bantuan Ke Rumah Sakit Rujukan

Saya sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para dokter, paramedis serta semua pihak yang telah menjalankan tugasnya dengan baik, tetap memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat di tengah meluasnya sebaran virus corona

## H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah

Purbalingga (22/03) — Anggota DPR RI FPKS Dapil Jawa Tengah VII, Rofik Hananto, mengecek kesiapan RSUD. Dr. R Goeteng Taroenadibrata dan Rumah Sakit Harapan Ibu Purbalingga sekaligus memberikan bantuan sebagai bentuk dukungan untuk program Melawan Virus Covid-19 atau yang lebih dikenal dengan Coronavirus.

Dalam kunjungannya wakil rakyat dari Purbalingga ini menyampaikan Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dokter dan

paramedis yang telah berjuang memberikan pelayanan terbaiknya dalam melawan virus corona ini.

"Saya sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para dokter, paramedis serta semua pihak yang telah menjalankan tugasnya dengan baik, tetap memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat di tengah terus meluasnya sebaran virus corona," ungkap Rofik.

Dalam kesempatan ini

Rofik Hananto yang didampingi oleh Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah: H. Tri Mulyantoro, S.H. juga memberikan bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD), Masker dan Hand Sanitizer.

"Yang kami lakukan Ini adalah salah satu upaya membantu Rumah Sakit memenuhi kebutuhan utamanya dalam mengatasi virus corona.

Masker, Hand Sanitizer dan APD adalah perlengkapan yang harus ada saat ini, semoga bantuan ini dapat membantu dokter dan paramedis dalam menjalankan tugasnya, dan kami sangat berharap ketika mereka menjalankan tugas kondisinya tetap baik, fit, sehat dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat," tambah Rofik.

alam kesempatan ini Rofik Hananto juga berpesan kepada masyarakat. Pertama, mengajak kepada masyarakat untuk terus meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, contohnya cuci tangan dengan sabun, untuk yang muslim



sering berwudhu dan menjaganya.

"Kedua saya mengajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan daya tahan tubuh melalui konsumsi makanan sehat seperti sayuran dan buah-buahan, back to nature, kembali ke makanan sehat berbahan baku alami," tuturnya.

Yang Ketiga, lanjut Rofik, mengajak para pengusaha untuk turut berperan serta dengan segala kemampuan

untuk membantu pemerintah melawan Corona, dan Keempat: Kami menghimbau dan memohon kepada masyarakat untuk sementara waktu berdiam diri dulu di rumah, tidak berpergian, karena berdiam diri di rumah sama saja telah membantu pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus corona ini.

Selengkapnya kunjungi Fraksi.pks.id

# Aleg PKS Bagikan Masker dan Hand Sanitizer ke Pengemudi Ojek Online

PKS terpanggil untuk ikut bersama-sama tim medis dan masyarakat menanggulangi bahaya persebaran virus corona. Bagi kami ini adalah kondisi darurat yang perlu segera diatasi. Untuk itu semua jajaran PKS, mulai dari kader hingga pimpinan partai bergerak dengan segala kemampuan untuk turut dalam upaya penanggulangan bencana ini

## Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten I

Serpong (22/03) — Sebagai wujud kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan para pengemudi ojek online, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto membagikan masker dan hand sanitizer, Ahad (22/03).

Pembagian masker dan hand sanitizer dilakukan secara langsung oleh Mulyanto bersama tim ke beberapa lokasi pangkalan ojek online di wilayah

Serpong, Tangerang Selatan, Banten.

Untuk meminimalisasi persebaran virus dalam kegiatan sosial tersebut sebelumnya dilakukan proses sterilisasi terhadap petugas yang terlibat dan barang yang akan dibagikan.

PKS terpanggil untuk ikut bersama-sama tim medis dan masyarakat menanggulangi bahaya persebaran virus

corona. Bagi kami ini adalah kondisi darurat yang perlu segera diatasi. Untuk itu semua jajaran PKS, mulai dari kader hingga pimpinan partai bergerak dengan segala kemampuan untuk turut dalam upaya penanggulangan bencana ini," papar Mulyanto.

Selain pembagian masker dan hand sanitizer kepada masyarakat, PKS juga melakukan edukasi atau sosialisasi upaya pencegahan dan penanganan wabah virus corona melalui media sosial. Edukasi ini dilakukan agar masyarakat tidak panik dan dapat meminimalisasi resiko penularan virus.

"Bukan cuma aksi langsung di lapangan, PKS juga minta Pemerintah membuat kebijakan yang tepat dan cepat untuk mengerahkan segala upaya agar penanggulangan pandemi global ini bisa dilakukan secara komprehensif. Pemerintah jangan ragu membuat keputusan di saat yang genting seperti ini," tegas Mulyanto.



# Ahmad Syaikhu Pimpin Penyemprotan Disinfektan di Kab. Bekasi dan Karawang

Apa yang kami lakukan hanya salah satu ikhtiar. Masih banyak langkah yang harus kita lakukan. antara lain mencuci tangan dengan sabun, handsanitizer, berperilaku hidup sehat, menjaga jarak dan diam di rumah selama tidak ada keperluan mendesak.

## H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi V DPR RI

Kabupaten Bekasi (22/03) — Anggota DPR RI Ahmad Syaikhu memimpin penyemprotan disinfektan di Kabupaten Bekasi dan Karawang, Ahad (22/03).

Kegiatan ini dalam rangka membantu pemerintah meminimalkan penyebaran Covid-19.

"Kami ingin membantu pemerintah agar Covid-19 ini bisa kita cegah dan minimalkan penyebarannya," ujar Politisi PKS itu.

Menurut Syaikhu, penyemprotan ini hanya salah satu

ikhtiar. Banyak langkah lain yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah virus ini.

"Apa yang kami lakukan hanya salah satu ikhtiar. Masih banyak langkah yang harus kita lakukan," kata Syaikhu lagi.

Langkah-langkah tersebut, lanjut Syaikhu, antara lain mencuci tangan dengan sabun, handsanitizer, berperilaku hidup sehat, menjaga jarak dan diam di rumah selama tidak ada keperluan mendesak.

Syaikhu mengajak semua

pihak mematuhi imbauan pemerintah, salah satunya untuk diam di rumah. Sebab ini akan memutus mata rantai virus.

"Patuhi imbauan pemerintah untuk diam di rumah. Karena ini cara kita memutus mata rantai virus," pungkasnya.

Dalam aksi penyemprotan tersebut, Syaikhu didampingi pimpinan DPD PKS Kabupaten Bekasi dan Karawang. Lokasi kegiatan antara lain kantor media, LSM dan rumah warga serta masjid.



# PKS Bagikan Masker ke Petugas Medis, Warga Hingga Semprot Disinfektan di Masjid di Banda Aceh

Sekarang kegiatan terkait dengan penanggulangan virus ini akan diantisipasi dan dikawal oleh tim pengawas DPR RI termasuk juga alokasi anggaran yang katanya ada Rp 62 triliun yang akan dialokasikan untuk penanggulangan Covid 19 itu

## H.M. Nasir Djamil, M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Aceh

Banda Aceh (22/3) — Cegah peredaran virus corona, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, membagikan masker kepada petugas medis RSIA Azzahra.

Selain membagikan kepada petugas medis pengurus DPD PKS Banda Aceh ini juga membagi - bagian kepada warga di warung kopi maupun yang melintas di jalan raya.

Selain itu membagikan hand sanitizer dan melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah mesjid di Banda Aceh,

yaitu di Masjid Syuhada Lamugop, Masjid Taqwa Long Raya dan Masjid Al-Abrr Lamdingan.

Anggota DPR-RI Nasir Djamil menyampaikan dalam hal ini DPR RI sendiri sudah membentuk tim pengawasan terkait dengan gugus tugas penanggulangan konflik Covid-19 itu.

Sekarang, kata Nasir Djamil, kegiatan terkait dengan penanggulangan virus ini akan diantisipasi dan dikawal oleh tim pengawas DPR RI termasuk juga alokasi anggaran yang katanya ada Rp 62 triliun yang

akan dialokasikan untuk penanggulangan Covid 19 itu

"Dalam hal ini DPR akan melakukan pengawasan, kemana saja uang itu dipergunakan apa dampaknya nanti," kata Nasir Djamil.

Nasir menambahkan terkait dengan penanggulangan virus di Indonesia barangkali angka Rp 62 triliun itu masih kecil dibanding dengan negara-negara lain.

Tapi pihaknya berharap kepada pemerintah bagaimana menjamin tenaga medis mulai dari dokter perawat dan sebagainya mereka bisa dilindungi.

"Artinya ada jaminan perlindungan kepada mereka agar kesehatan kepada mereka sehingga mereka ketika bekerja tidak was-was tidak khawatir karena kita tahu bahwa dokter dan tenaga medis yang meninggal setelah menangani pasien virus corona," tuturnya.

Hadir dalam kegiatan itu Anggota DPRA, Irawan Abdullah, Anggota DPR RI, M. Nasir Djamil, Ketua DPRK Banda



Aceh, Farid Nyak Umar, Ketua Fraksi, Tuanku Muhammad.

Anggota, Irwansyah, Tati Meutia Asmara, Devi Yunita, Sekretaris DPW PKS, Khairul

Amal, Ketua DPD PKS, Banda Aceh Iwan Sulaiman dan segenap pengurus DPD PKS.(\*)

## Tangkal Wabah Corona

# Nevi Zuairina Ajak Masyarakat Masifkan PHBS dan Jaga Wudhu

Tetap bagi yang muslim menjaga wudhu ya, lalu ikuti anjuran protokol pencegahan Covid-19 dikeluarkan Presiden Joko Widodo, seperti jaga jarak dengan orang lain, jangan dekat kerumunan orang, cuci tangan selalu dan tetap berdiam di rumah, keluar jika perlu saja

### Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumbar

Padang (21/03) — Corona virus terus mencekam memori warga dunia, ketakutan tidak bisa dihidari lagi, Sumbar sampai sore ini belum ada satu pun warganya positif Covid-19.

"Alhamdulillah dari data nasional maupun data penanganan pasien di rumah sakit di Sumbar belum ada, dan semoga tidak ada pasien positif Corona Virus," ujar Anggota Komisi 6 dari Fraksi PKS DPR RI Nevi Zuairina usai bersama Gubernur Sumbar melihat

kesiapan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Sabtu (21/03).

Tapi meski begitu, Anggota DPR RI dari Dapil Sumbar 2 tetap ingatkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk tidak lengah.

"Virus itu tidak tahu kapan datangnya dan menyerang masyarakat, kita semua harus waspada dan tetap besatu, bersama kita lawan corona virus ini," ujar Nevi.

Nevi juga istri

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengajak masyarakat Sumbar untuk memasifkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

"Tetap bagi yang muslim menjaga wudhu ya, lalu ikuti anjuran protokol pencegahan Covid-19 dikeluarkan Presiden Joko Widodo, seperti jaga jarak dengan orang lain, jangan dekat kerumunan orang, cuci tangan selalu dan tetap berdiam di rumah, keluar jika perlu saja," ujar Nevi.

Nevi juga berpesan kepada dokter dan para medis yang berjibaku menangani pasien ODP dan PDP corona di berbagai rumah sakit untuk mengedepankan safety diri sendiri.

"Dokter serta para medis adalah pahlawan kemanusiaan saat ini, ibu mohon untuk utamakan safety pribadi, dan kepada pemerintah mohon dilengkapi safety para dokter dan para medis yang bertugas tak kenal lelah menangkal virus corona ini," ujar Nevi.



# Syahrul Aidi Himbau Pengusaha di Riau Bantu Penanganan Covid-19

Kita menghimbau kepada para pengusaha, baik besar atau pun kecil, untuk terlibat dalam penanganan penyebaran virus Corona ini. Baik dalam upaya pencegahan, maupun dalam upaya penanganan. Karena bagaimanapun, virus ini sudah jadi musuh bersama saat ini. Bukan kita saja namun musuh global

## H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Riau

Bangkinang (21/03) — Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi terus mengkhawatirkan masyarakat atas penyebaran pandemi Coronavirus Disease (Covid-19). Kali ini dia mengetuk hati para pengusaha terlibat dalam penanganan wabah ini.

Hal itu disampaikan oleh Syahrul Aidi saat dihubungi pada Sabtu (21/3/2020) sore via seluler.

"Kita menghimbau kepada para pengusaha, baik besar atau pun kecil, untuk terlibat

dalam penanganan penyebaran virus Corona ini. Baik dalam upaya pencegahan, maupun dalam upaya penanganan. Karena bagaimanapun, virus ini sudah jadi musuh bersama saat ini. Bukan kita saja namun musuh global," himbau Syahrul Aidi di ujung telepon.

indakan nyata Syahrul Aidi dengan mengagendakan pertemuan antara pengelola Rumah Sakit Awal Bross dengan Gubernur Riau pada Sabtu malam ini. Tujuannya bahwa RS Awal Bross

ingin menunjukkan keseriusan menangani Coronavirus.

"Saya tadi menghubungi dokter Farhan, pengelola Awal Bros, meminta dia untuk ikut menangani penyebaran pandemi ini. Alhamdulillah dia respon dan merasa terpenggil untuk membantu Pemda. Maka malam ini kami direncanakan bertemu dengan Gubernur Riau untuk mendengar langkahnya," tambah pria tamatan Al Azhar Mesir ini.

Dia juga menambahkan bahwa banyak perusahaan nasional bahkan multi nasional di Riau seperti Chevron, RAPP, Sinar Mas Grup, PTPN V, dan lainnya. Namun hingga kini dia belum mendengar apa langkah dari perusahaan tersebut.

"Rencananya nanti saya juga akan mendorong Gubri untuk memanggil pengusaha tersebut sebelum terlambat. Agar kita bersama-sama dari sekarang mengatasinya. Jangan tunggu terlambat seperti China dan Italia. Jika terlambat, kita takkan siap menghadapinya." tegasnya.



Sebagai Bukti Serius Atasi Korona

# HNW: Pemerintah Harus Usut Tuntas Lolosnya 49 TKA Tiongkok di Sultra.

"Masuknya pun tanpa dikarantina selama 14 hari sesuai ketentuan. Padahal mereka datang dari Negara Tiongkok, negara asal awal COVID-19 dan penyebarannya. Ini harus diusut secara tuntas. Sebagai bukti keseriusan penanganan COVID-19. Dan untuk memberikan efek jera. Agar tak terulang lagi,"

**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI II meliputi Luar Negeri

Jakarta (20/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah serius menangani masalah penyebaran COVID-19 dengan secara ketat melaksanakan ketentuan hukum termasuk mengusut tuntas masuknya 49 tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Tiongkok di Sulawesi Tenggara di tengah wabah COVID-19 di Indonesia.

Hidayat yang akrab disapa HNW ini menuturkan bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia telah menegaskan

bahwa larangan masuk atau transitnya warga Tiongkok ke Indonesia masih berlaku sejak diumumkan pada 2 Februari 2020 lalu, dan juga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya COVID-19, tetap berlaku.

Lebih lanjut, HNW yang juga Wakil Ketua MPR RI ini menegaskan semestinya semua pihak serius mengawasi penyebaran wabah COVID-19,

dan seharusnya semua pihak, seperti imigrasi, kepolisian dan Kemenakertrans untuk taat terhadap ketentuan yang sudah dikeluarkan seperti oleh Kemenlu dan Kemenhukham.

HNW pun mempertanyakan, bagaimana bisa 49 TKA Tiongkok lolos ke Kendari? Padahal mereka hanya memegang visa kunjungan, yang semestinya (berdasarkan keputusan Kemenlu) tak boleh masuk ke Indonesia.

"Masuknya pun tanpa dikarantina selama 14 hari sesuai ketentuan. Padahal mereka datang dari Negara Tiongkok, negara asal awal COVID-19 dan penyebarannya. Sebagai bukti keseriusan penanganan COVID-19. Dan untuk memberikan efek jera. Agar tak terulang lagi," tegas Hidayat dalam rilisnya yang diterima redaksi elshinta.com, Rabu (18/3).

Atas kecerobohan ini, HNW berpendapat Presiden Joko Widodo perlu mengikuti langkah tegas yang telah dilakukan oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk mengatasi masalah



COVID-19, dengan memecat pejabat imigrasi yang membiarkan WNA asal Tiongkok masuk ke Filipina di tengah mewabahnya COVID-19 di negara tersebut. "Ini perlu dipertimbangkan untuk menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia benar-benar serius menegakkan aturan dan mengawasi wabah COVID-19," ujarnya.

Selain itu, HNW juga meminta agar pihak yang memberi informasi secara salah ke Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) juga perlu diusut tuntas.

HNW menyambut baik

keseriusan legislator lokal dari DPRD Sultra yang menyerukan agar para TKA itu segera dipulangkan. Namun, kasus ini sebaiknya tidak berhenti sampai itu, melainkan harus diusut secara tuntas agar menjadi pelajaran bersama.

"Kalau memang serius atas COVID-19, laksanakanlah aturan-aturan dengan tegas, jangan untuk kepentingan investasi, keamanan dan keselamatan rakyat dan negara akibat COVID-19 diabaikan. Jangan sembrono!" tandasnya.

# Jaring Aspirasi, Toriq: Masyarakat Minta Pemerintah Perkuat Ekonomi di Daerah

Insha Allah segala aspirasi dari peserta tadi akan saya sampaikan kepada pemerintah agar menjadi tolak ukur untuk memperbaiki infrastruktur daerah disemua bidang

## KH TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI Dapil JabarXI

Tasikmalaya (19/03) — Anggota Komisi I Dewan Pimpinan Rakyat Republik Indonesia, Toriq Hidayat, melakukan kegiatan reses masa persidangan II tahun 2019/2020 di Kota Tasikmalaya, Minggu (15/03/2020).

"Alhamdulillah dibantu pengurus PKS setempat kegiatan jaring aspirasi bersama 150 peserta yang berasal dari kota Tasik bisa dilaksanakan dengan baik", ungkap Toriq.

Pada kesempatan itu, Toriq menjelaskan bahwa kegiatan reses ini bertujuan, untuk menyerap semua aspirasi yang berkembang di masyarakat sekaligus

menyampaikan situasi terkini dan kedinisian secara umum, sehingga bisa pahami oleh masyarakat, khususnya masyarakat kota Tasik.

"Saya sampaikan ke peserta jaring aspirasi bahwa periode ini saya berada di komisi I, berbeda dengan periode sebelumnya," tutur Toriq.

Komisi I bermitra dengan Menhan, Menkominfo, Menlu dan BIN. Pada jaring aspirasi kali ini, masyarakat perlu mengetahui fungsi dan tugas mitra kerja komisi I secara umum tambah Toriq.

Selanjutnya, politisi Partai Keadilan Sejahtera(PKS) ini menyampaikan hal-hal yang

diminta oleh fraksi PKS agar disampaikan kepada masyarakat saat reses.

"Secara sederhana saya menjelaskan tentang RUU Omnibuslaw, RUU ketahanan keluarga dan wabah virus corona dan pencegahannya agar mudah dipahami" jelas Toriq.

Toriq berharap dengan cara berdialog langsung, masyarakat bisa tahu kondisi terkini dan kedinisian Indonesia dan dapat menyampaikan apa yang diinginkan untuk pembangunan daerah ke depan.

Setelah penjelasan yang disampaikan oleh Toriq, beberapa hal disampaikan oleh peserta jaring aspirasi diantaranya pertama mereka meminta agar Fraksi PKS mengawal RUU omnibuslaw agar RUU tersebut berpihak pada rakyat, kedua meminta Fraksi PKS mendorong pemerintahan memperhatikan dengan serius nasib rakyat daerah terutama pemerataan di bidang ekonomi dan kesejahteraan, dan ketiga



meminta Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk menangani virus corona secara komprehensif.

"In sya Allah segala aspirasi dari peserta tadi akan

saya sampaikan kepada pemerintah agar menjadi tolak ukur untuk memperbaiki infrastruktur daerah disemua bidang," tutup Toriq pada akhir sesi Jaring Aspirasi.

# Warga TPST Bantar Gebang Minta Anggota DPR Bebaskan Biaya Pendidikan

Pendidikan itu sangat penting. Oleh karena itu saya berharap agar orang tua berperan dalam menjalankan peran pendidik utama bagi putra putrinya agar terwujud generasi tangguh yang kokoh

## Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar VI

Bekasi (18/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Nur Azizah Tamhid di masa reses menyempatkan hadir menyapa warga Bekasi tepatnya di TK Amrina TPST Bantar Gebang, Bekasi, Sabtu, (14/03/2020).

Kedatangan Nur Azizah Tamhid yang merupakan Anggota DPR Dapil Jabar VI Bekasi-Depok, mendapatkan apresiasi dari para pengelola sekolah, guru juga warga, sebagaimana disampaikan Kepala Sekolah TK Amrina.

"Kehadiran anggota DPR RI Ibu Nur Azizah Tamhid adalah sebuah kehormatan bagi sekolah khususnya karena hal

tersebut sangat langka dan spesial", tutur Kepala Sekolah TK Amrina.

Para warga dan tokoh masyarakat menyampaikan harapan dan aspirasi diantaranya harapan biaya pendidikan mulai TK hingga Perguruan tinggi yang bisa dibebaskan, sehingga putra putri mereka yang umumnya sebagai pemulung, bisa mengenyam pendidikan dengan baik.

Menanggapi aspirasi tersebut, Nur Azizah mengatakan Pendidikan memang pondasi penting tegaknya kehidupan yang baik yang dapat diwujudkan dimulai

dari lingkungan terkecil yaitu keluarga hingga Negara.

"Pendidikan itu sangat penting. Oleh karena itu saya berharap agar orang tua berperan dalam menjalankan peran pendidik utama bagi putra putrinya agar terwujud generasi tangguh yang kokoh," harap Nur Azizah Tamhid.

Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD PKS Bekasi Alimuddin, Nahwan Sekkel Ciketing Udik, Ketua DPRa Ceking Udik Junjun Juanda, Para Pengurus Karang Taruna Kelurahan Ciketing Udik, guru, wali siswa dan warga sekitar.



Anggota DPR Dapil Maluku :

# Pemda Perlu *Support* RS Rujukan Antisipasi Sebaran Covid 19

Penyiapan ruang isolasi ini karena posisi Maluku yang memiliki banyak pintu masuk atau multi gate cukup rawan. Arus masuknya orang di Maluku sifatnya multi gate. Bukan hanya lewat bandara dan pelabuhan, tapi pintu-pintu lain juga menjadi jalur masuknya orang ke Maluku”

## SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

Ambon (18/03) — Anggota DPR RI Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, mengapresiasi langkah Gubernur Propinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon yang sigap dan melakukan langkah preventif untuk mencegah menyebarnya Virus Corona di Maluku.

Saadiah mendorong agar semua pemda kabupaten/kota di Maluku melakukan langkah serupa.

“Gubernur Maluku dan

Walikota Ambon telah mengambil langkah preventif untuk cegah meluasnya wabah Covid 19 di Maluku. Waspada Covid 19 kita dorong untuk diantisipasi oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota di Maluku”, sebut Saadiah kepada wartawan di Ambon, Rabu, (18/3).

Bentuk kesiapan antisipasi mewabahnya Virus Corona di Maluku lanjut Saadiah termasuk diantaranya memastikan seluruh rumah

sakit pemerintah di kabupaten/kota menyiapkan ruang isolasi bagi PDP (Pasien Dalam Pengawasan) yang terjangkiti Covid 19.

“Semua rumah sakit pemerintah di Kabupaten/Kota se-Maluku penting menyiapkan ruang isolasi untuk antisipasi Covid 19”, sarannya.

Menurutnya, penyiapan ruang isolasi ini karena posisi Maluku yang memiliki banyak pintu masuk atau multi gate cukup rawan.

“Arus masuknya orang di Maluku sifatnya multi gate. Bukan hanya lewat bandara dan pelabuhan, tapi pintu-pintu lain juga menjadi jalur masuknya orang ke Maluku”, terangnya.

Tidak semua pintu masuk itu dapat dipantau. “Nelayan dari pula jawa yang menggunakan kapal-kapal ikan dengan daerah operasi di Kepulauan Aru misalnya, adalah contoh pintu masuk yang saya maksud. Maka antisipasi demikian menurutnya perlu



difikirkan,” tandasnya.

“Kesiapan rumah sakit dengan ruang isolasi di wilayah – wilayah seperti di Kepulauan Aru, Maluku Tenggara akan membantu kendali atas sebaran Covid 19 di masyarakat”, kata Saadiah.

Saadiah meyakini bahwa pemerintah provinsi telah membentuk gugus tugas daerah percepatan penanganan COVID-19 atau virus corona sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020.

“Selain gugus tugas, perlu didorong ada alokasi anggaran penanganan virus corona atau COVID-19. Anggaran itu diperuntukkan bagi pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan

khusus untuk warga jika terdampak Covid 19”, sarannya.

Covid 19 kata Saadiah adalah Kejadian Luar Biasa (KLB). Maka, Dinas Kesehatan Propinsi Maluku sejak dini sudah memastikan, rumah sakit rujukan telah siaga untuk melakukan penanganan jika ada yang terpapar Covid 19.

“Rumah Sakit Haulussy dan RS rujukan lainnya, saya kira penting disupport. Seperti tambahan alat pelindung diri atau APD, sarana prasarana habis pakai, dan viral transport medium (VTM). Ketiganya diperlukan untuk penanganan penyebaran virus Corona”, katanya.

Foto : dpr.go.id



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



# *Terima Kasih* **Petugas Medis**

*Yang berjuang di garis depan  
melawan virus corona.  
Semoga Allah memberi  
perlindungan dan kesehatan*

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

# Saat Reses, Aleg PKS: Petani Kopi Hadapi Tiga Masalah Besar

Seiring meningkatnya konsumsi kopi dunia, isu kualitas kopi dimunculkan oleh para eksportir asing dengan melakukan sertifikasi produk kopi. Para petani kopi lokal keberatan dengan penilaian tersebut, karena cenderung menilai rendah kualitas kopinya. Ini lantaran para pelaku usaha kecil dan menengah belum memiliki teknologi pengolahan yang memadai.

## Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Wonogiri (15/03) — Para petani kopi di Indonesia ternyata menghadapi tiga masalah besar yang sangat krusial. Ketiganya adalah kualitas produk kopi, permodalan, dan pemenuhan pasar.

Di tengah meningkatnya konsumsi kopi secara global, persoalan komoditas kopi ini harusnya jadi titik perhatian pemerintah. Ketiga masalah besar tersebut harus

terpecahkan agar petani kopi sejahtera.

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin mengungkapkan, seiring meningkatnya konsumsi kopi dunia, isu kualitas kopi dimunculkan oleh para eksportir asing dengan melakukan sertifikasi produk kopi.

Menurut Hamid, Para petani kopi lokal keberatan

dengan penilaian tersebut, karena cenderung menilai rendah kualitas kopinya. Ini lantaran para pelaku usaha kecil dan menengah belum memiliki teknologi pengolahan yang memadai.

"Teknologi pengolahan dan kemasan pada industri skala kecil dan menengah masih sangat sederhana. Masalah pengetahuan penanganan pascapanen juga jadi kendala yang serius. Petani masih relatif menangani pascapanen secara tradisional. Akibatnya mutu kopi sebagai bahan baku industri pengolahan kopi relatif rendah, atau paling tidak sulit diharapkan kekonsistenan kualitasnya," jelas Hamid.

Saat ini, tambah Hamid, perkebunan kopi di Indonesia masih didominasi oleh perkebunan rakyat. Data 2006 mencapai 96 persen (1,21 juta ha dari total 1,26 juta ha). Sementara data mutakhir dari GAEKI (Gabungan Eksportir Kopi Indonesia), produksi kopi di Indonesia merupakan kopi rakyat (smallholders coffee),



sedangkan selebihnya adalah kopi perkebunan besar (estates coffee). Komposisi kopi robusta kurang lebih 83 persen dari total produksi kopi Indonesia dan sisanya 17 persen berupa kopi arabika.

Perbandingan produksi kopi robusta dengan arabika tersebut diharapkan prosentasenya dapat ditingkatkan, yaitu untuk kopi arabika menjadi 30 persen dan robusta 70 persen. Sementara isu kedua soal permodalan, legislator asal Wonogiri, Jawa Tengah ini menjelaskan, produksi kopi untuk setiap satu ton, biaya yang dikeluarkan petani untuk operasional sampai masa panen mungkin sekitar Rp 6-7 juta dengan luas lahan berbeda-beda, ada yang 1-2 hektar. Ada juga petani yang

hanya punya 0,5 hektar.

Dalam setahun masa panen kopi hanya sekali. Petani akan menghadapi tantangan untuk mengatur pengeluaran yang didapat dari panen kopi tersebut. Biasanya jika tidak sedang masa panen, petani kopi beralih ke usaha lain seperti menanam pisang hingga menjadi pedagang.

"Terkadang persoalan modal muncul akibat konsistensi petani dalam menghasilkan kopi. Dengan bantuan KUR, diharapkan mampu menggenjot produksi kopi nasional, asalkan sesuai prosedur dan peruntukan tanpa ada penyelewengan," ulasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id  
Foto : dpr.go.id

# Dalam Masa Reses, Sakinah Beri Perhatian Bagi Pembangunan Poso

Untuk pembinaan kepemudaan dan olahraga insyaallah akan diusahakan program dalam bentuk pembinaan yang akan disalurkan melalui DPD PKS Kabupaten Poso

**Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag.**

Anggota Komisi X DPR RI Dapil Sulawesi Tengah

Kabupaten Poso (15/03) — Legislator Dapil Sulawesi Tengah Fraksi PKS Sakinah Aljufri, melakukan kegiatan reses pada masa sidang kedua di Kelurahan Moengko Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso Kamis, (12/03/2020).

Reses kali ini dilakukan dengan berdialog dengan warga masyarakat Kota Poso, kader dan simpatisan PKS di rumah kader PKS Fadli Rone.

Dalam kegiatan resesnya kali ini Sakinah didampingi oleh ketua DPD PKS Kabupaten Poso Amir Kusa. Turut hadir dalam kegiatan ini Sekum DPD

PKS Kabupaten Poso serta Ketua Bidang Polhukam.

“Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah dari Fraksi PKS Sakinah Aljufri, yang juga merupakan Sekjen WIA Pusat sangat memberikan perhatian serius kepada Kabupaten Poso. Setiap reses, aleg PKS ini selalu meluangkan waktunya untuk melakukan reses di Kabupaten Poso”, terang Ketua DPD PKS Kabupaten Poso Amir Kusa dalam sambutannya pada kegiatan dialog dengan warga.

Dalam dialog ini Sakinah banyak sekali mendapatkan aspirasi dari masyarakat, salah satunya permohonan

pemberdayaan ekonomi kreatif pengelolaan ikan rono.

“Kami memohon kepada Pemerintah melalui aleg PKS agar ada pemberdayaan ekonomi kreatif di Moengko terutama usaha industri rumah tangga yaitu pengolahan ikan rono yang ada di Moengko,” pinta perwakilan warga dari Kelurahan Moengko saat menyampaikan aspirasinya warganya.

Ikan rono adalah makanan khas masyarakat Kaili, terbuat dari ikan teri yang dibungkus daun pisang dan dipanggang. Rono dange mempunyai aroma dan rasa yang khas, karena saat memasak ikan dibungkus dengan daun pisang dan ditambah sedikit garam. Ikan rono dange mampu bertahan hingga dua hari, dan dapat dipanaskan kembali jika akan disantap.

Menanggapi aspirasi warga terkait pemuda dan olahraga Sakinah akan memfasilitasi program pembinaan pemuda dan olahraga.

“Untuk pembinaa



kepemudaan dan olahraga insyaallah akan diusahakan program dalam bentuk pembinaan yang akan disalurkan melalui DPD PKS Kabupaten Poso,” tutur Sakinah

# Fikri Dorong Generasi Muda Lebih Percaya Diri Bangun Tegal

Dalam dunia seni dan perfilman, Tegal pun dipandang sangat potensial. Banyak sineas lahir di Tegal, Di era internet saat ini, selain skills, ide kreativitas menjadi barang yang sangat mahal. Sudah saatnya Kabupaten Tegal bangkit melibatkan anak muda,

## Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dapil Jawa Tengah IX

Tegal (15/03) — Kabupaten Tegal punya begitu banyak potensi, termasuk dari ide dan gagasan. Banyak benih kreativitas lahir di Tegal. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, dalam sesi podcast yang diselenggarakan Humas Kabupaten Tegal di Trasa Coworking Space, Jumat, (13/03/2020).

Fikri Faqih mencontohkan di Balapulang ada anak muda kreatif yang bisa memindahkan foto dalam desain kayu, di Karanganyar juga ada pengrajin kamacata kayu.

"Itu baru dari satu sisi

subsektor ekonomi kreatif," ungkapnya.

Fikri menjelaskan di dunia olahraga banyak anak muda Tegal berprestasi sebut saja Banyu Tri Mulyo (atlet tenis meja), Irkham Zahrul Mila (atlet sepakbola).

"Dalam dunia seni dan perfilman, Tegal pun dipandang sangat potensial. Banyak sineas lahir di Tegal," kata Fikri.

Di era internet saat ini, selain skills, ide kreativitas menjadi barang yang sangat mahal.

"Sudah saatnya Kabupaten Tegal bangkit dengan

melibatkan anak muda," kata Fikri.

Acara yang dipandu Joko Prabowo itu lebih banyak menyoroti peran generasi muda. Ia menyebutkan demografi penduduk Kabupaten Tegal 50,6% nya adalah anak muda yang usianya dibawah 30 tahun. "Mampukah anak muda membaca peluang?" tanyanya. Fikri meyakinkan bisa.

Menurutnya anak muda perlu didorong rasa percaya dirinya. "Tidak perlu minder. Sudah saatnya semua potensi kecerdasan dibangun, kreativitas terus diasah," jelas Fikri.

Fikri justru mempertanyakan kenapa acara Internasional Tea Festival tempatnya justru di Bandung, bukan di Tegal. Padahal, menurut Fikri, secara potensi Tegal dikenal sebagai kota penghasil teh, pabrik teh juga banyak berdiri di Tegal.

"Saya kira ini masalah kreativitas dan kejelitan menangkap peluang," ungkapnya.

Di sektor pendidikan, para



penyelenggara pendidikan terutama vokasi seperti SMK maupun politeknik seharusnya bisa bersinergi dengan dunia industri atau dunia usaha. "Di Jerman jumlah pengangguran dari pendidikan vokasi adalah

0%, karena yang membuka pendidikan vokasi adalah perusahaan. Jika ingin belajar dari sana, pastikan jurusan atau prodi yang dibuka memang benar-benar dibutuhkan di dunia kerja.

# Akhir Reses, Hermanto Adakan Temu Masyarakat di Pinggir Kolam

Saya datang ke lokasi kolam ini dalam rangka melihat dari dekat dan memastikan bahwa bapak dan ibu memang betul-betul telah berusaha di bidang perikanan. Kepastian ini penting, agar nantinya bantuan Pemerintah betul-betul sampai ke orang yang tepat

## Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Sumbar

Solok (22/03) — Anggota DPR dari Dapil Sumbar 1 Hermanto, dalam perjalanan resesnya di dapil mengunjungi masyarakat perikanan di Kabupaten Tanah Datar dan Kota Solok.

Masyarakat perikanan di kedua daerah tersebut sebelumnya telah mengajukan aspirasi agar diperjuangkan mendapatkan bantuan benih dan pakan ikan dari Pemerintah.

"Saya datang ke lokasi kolam ini dalam rangka melihat dari dekat dan memastikan

bahwa bapak dan ibu memang betul-betul telah berusaha di bidang perikanan. Kepastian ini penting, agar nantinya bantuan Pemerintah betul-betul sampai ke orang yang tepat", papar Hermanto.

Orang yang tepat itu, lanjutnya, adalah mereka yang sudah punya pengalaman memelihara ikan dalam skala mikro dan butuh bantuan untuk peningkatan usahanya. Bapak dan ibu adalah orang yang tepat", ucap legislator FPKS ini.

"Saya semakin mantap

memperjuangkan aspirasi bapak dan ibu sekalian", pungkas legislator Komisi 4 DPR ini.

Ada 3 kelompok masyarakat perikanan yang dikunjungi Hermanto ke lokasi kolamnya.

Pertama, Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Pincuran Tarok Abadi dari Kabupaten Tanah Datar yang menyampaikan aspirasi 60.000 ekor benih ikan nila dan 5 ton pakan ikan.

Kedua, Pokdakan Sehati dari Kota Solok yang menyampaikan aspirasi 15.000 ekot benih ikan nila dan pakan 2 ton. Ketiga, Pokdakan Sukma Jaya dari Kota Solok dengan aspirasi 50.000 ekor benih ikan nila dan 5 ton pakan.



# Masa Reses, Mahfudz Abdurrahman Hadiri Muktamar Salimah

Kita tahu bahwa peran koperasi adalah memperkokoh perekonomian rakyat dan bisa menjadi badan usaha ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, pun UMKM sama, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia, sehingga hal ini harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah dalam membina dan mengembangkannya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia

## MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (15/03) — Organisasi Massa Persaudaraan Muslimah yang biasa disebut Salimah, didirikan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2000 oleh sekelompok muslimah Indonesia.

Sebagai sebuah organisasi wanita, Salimah bersinergi dengan 96 ormas perempuan nasional yang tergabung di Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dan 34 ormas Muslimah yang tergabung di Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI).

Sebagai sebuah ormas yang terus beramal menapaki fase-fase pertumbuhannya, Salimah terus berkiprah melakukan berbagai upaya positif. Mengokohkan dan meluaskan struktur diberbagai pelosok bumi pertiwi, meningkatkan kualitas pengurus dan anggotanya, meningkatkan profesionalitas kerja, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki kepedulian serta menghadirkan berbagai program kegiatan yang

bermanfaat bagi masyarakat.

Di tahun 2020 ini Persaudaraan Muslimah (Salimah) menggelar kegiatan Muktamar V di Jakarta. Muktamar diikuti oleh 34 Pimpinan Wilayah dari seluruh Provinsi yang ada di Indonesia dan 2 Pimpinan Salimah Luar Negeri.

Muktamar kali ini mengusung tema Meningkatkan Kermitraan Organisasi Menuju Indonesia Unggul.

Pada kesempatan Muktamar V Salimah ini, hadir Mahfudz Abdurrahman yang merupakan Anggota DPR RI Fraksi PKS.

Mahfudz menyampaikan pesan kepada Salimah untuk memperluas dan menguatkan kemitraan khususnya pada bidang pengembangan Koperasi dan peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sangat memerlukan kontribusinya secara positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Peran UMKM ini sangat baik bagi pertumbuhan Indonesia saat ini, selain dapat mengurangi pengangguran, UMKM juga dapat meningkatkan devisa bagi negara tuturnya kepada media.



Selain itu, Mahfudz Abdurrahman yang juga Anggota Komisi VI DPR RI yang salah satu ruang lingkup tugasnya bidang Koperasi dan UKM dimana mitranya adalah kementerian Koperasi dan UKM berpesan kepada pemerintah agar lebih serius dan meningkatkan perhatiannya kepada perkoperasian dan UMKM yang ada di Indonesia.

"Kita tahu bahwa peran koperasi adalah memperkokoh perekonomian rakyat dan bisa menjadi badan usaha ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, pun UMKM sama, dapat meningkatkan

perekonomian masyarakat Indonesia, sehingga hal ini harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah dalam membina dan mengembangkannya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Mahfudz.

Selain dari pada itu, UMKM juga sudah teruji pada saat krisis global melanda dunia, kontribusi UMKM dalam roda perekonomian Indonesia masih bisa berdiri tegak. Itulah sebabnya peran UMKM begitu jelas terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tambahnya.

Selengkapnya du Fraksi.pks.id

# Habib Aboe Hadiri Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba Jaringan Internasional

Saya minta Polda Kassel khususnya Direktorat Narkoba terus bekerja keras mengungkap jaringan lain yang masih beroperasi. Tentunya perlu ada kerja sama lintas instansi seperti dengan BNN, imigrasi, pelabuhan dan bandara

## HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI Dapil Kalimantan Selatan

Banjarmasin (16/03) – Disela kegiatan Reses, Anggota DPR RI Fraksi PKS Aboe Bakar Al-Habsy diundang mengikuti konferensi pers pengungkapan tindak pidana narkoba di Polda Kassel (16/03/2020).

“Saya mengapresiasi kinerja Polda Kassel yang mampu mengungkap jaringan narkoba internasional dalam jumlah yang sangat besar yaitu 208 kg sabu dan 13,912 kg ekstasi,” ungkap pria yang disapa Habib Aboe ini.

Habib Aboe menambahkan bahwa pengungkapan ini merupakan prestasi luar biasa

Polda Kassel.

“Ini sangat bagus, karena yang ditangkap adalah jaringan internasional dari Malaysia, Kaltara, Kaltim dan Kassel,” tandasnya. Narkoba sejumlah itu, lanjut Habib Aboe, akan berdampak pada 2 juta orang pengguna.

“Tentunya ini jumlah yang sangat besar. Karenanya upaya pengungkapan harus terus dilakukan untuk menangkal masuknya narkoba ke Kassel”, tutur Bendahara Fraksi PKS ini.

Menurutnya, narkoba adalah ancaman nyata untuk generasi muda Kassel,

karenanya semua pihak perlu bersatu padu untuk melawan peredarannya. Fakta di lapangan, saat ini lapas-lapas di Kassel semuanya over kapasitas, mayoritas mereka adalah para terpidana kasus narkoba. Ini adalah indikasi besarnya pengguna dan pengedar narkoba di Kassel.

“Saya minta Polda Kassel khususnya Direktorat Narkoba terus bekerja keras mengungkap jaringan lain yang masih beroperasi. Tentunya perlu ada kerja sama lintas instansi seperti dengan BNN, imigrasi, pelabuhan dan bandara”, tegas Ketua MKD DPR ini.

Di akhir pernyataannya, Habib Aboe berpantun “Makan singkong dibelah dua, Aduh rasanya enak sekali, Jangan pernah konsumsi narkoba, Karena narkoba mengancam mati”.

“Beli mobil mesinnya disel, Mulus jalan di atas aspal, Saya apresiasi kerja polda kassel, Memberantas jaringan narkoba internasional”, tutup Habib Aboe.



# Reses di Cisolok, Slamet Sosialisasikan Program Ibu Berdaya

Program Ibu Berdaya merupakan program sejenis koperasi pinjaman bagi ibu-ibu. Program tersebut, sambung Slamet, saat ini telah memiliki nasabah sebanyak 125 orang. Koperasi pinjaman untuk ibu-ibu melawan bank emok.

## drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Jawa Barat IV

Sukabumi (16/03) — Fenomena Bank Emok di Sukabumi nampaknya memang sudah sangat sulit untuk tidak diakui keberadaannya. Kendati demikian, Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Slamet mengatakan, dirinya masih sangat optimis untuk bisa memberikan solusi lain bagi masyarakat yang sedang memerlukan uang, agar para masyarakat tidak meminjam kepada bank emok.

"Nama programnya adalah Ibu Berdaya. Program ini saya peruntukkan bagi warga Sukabumi yang memang

sedang memerlukan uang," kata Slamet usai melakukan reses di Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, Minggu (15/03/2020)

Slamet menjelaskan, program Ibu Berdaya merupakan program sejenis koperasi pinjaman bagi ibu-ibu. Program tersebut, sambung Slamet, saat ini telah memiliki nasabah sebanyak 125 orang.

"Koperasi pinjaman untuk ibu-ibu melawan bank emok. Saat ini programnya sudah berjalan di bulan kedua, jadi memang diharapkan bisa

meminimalisir bank emok. Niat utamanya tentu ingin memerangi riba," jelas Slamet.

Selain melakukan sosialisasi program Ibu Berdaya, dalam reses tersebut, Slamet juga menyampaikan beberapa janji kampanye PKS yang sudah terealisasi.

"Janji kampanye PKS yang sudah dijalankan, yaitu SIM seumur hidup dan perlindungan ulama. Tak hanya itu, janji soal pajak motor juga sudah masuk dalam program legislasi periode ini," tukasnya.



كتلة حزب العدالة والرفاهية يحصل على جائزة كأكثر

# الكتل استجابة لطموحات الشعب، وجازولي جويني يفوز بجائزة "نجم البرلمان"



”

بالنسبة لكتلة حزب العدالة والرفاهية هذه هدية يجب أن نشعر بالامتنان لها وفي نفس الوقت نزيد من أدائنا لتكون أكثر استجابة للطموح ولموسا في الدفاع من أجل مصالح الشعب والأمة والدولة من خلال القنوات البرلمانية

## الدكتور جازولي جويني

رئيس كتلة حزب العدالة والرفاهية في مجلس النواب الإندونيسي

صانع الأخبار. / "News Maker" جائزة " ولكن ، هذه الجائزة هي الدافع وفقا لجازولي ، آثار هذا بشكل متزايد وليس فقط من هذه الكتلة فحسب ولكن أيضا من الأحزاب الأخرى ، ونصبح أقوى في خدمة الشعب. هكذا اختتم الجازولي كلمته .

خلال الوسائط الرقمية عند الكتلة. هكذا شرح الجازولي. يأمل عضو المجلس من منطقة بانتن أن يكون أعضاء الكتلة بشكل خاص وأعضاء مجلس النواب بشكل عام في متناول الناس بسهولة أكثر ، ويقبلون بجدية تطلعاتهم ويدافعون من أجلها ، بحيث يكون وجه هذه المؤسسة التمثيلية أفضل في صورتها وأدائها في عين الشعب.

### نجم البرلمان وصانع الأخبار لأعضاء كتلة حزب العدالة والرفاهية

بالإضافة إلى الحصول على جائزة في فئة أكثر الكتل استجابة لطموحات الشعب. مُلِّب من رئيس الكتلة جازولي جويني أيضا الحصول على جائزة في نجم "Star of Parliament" فئة

الفئات التي تستخدمها اللجنة وهيئة المحلفين أعضاء منتخبون في المجلس أكثر من ثلاث مرات أو ثلاث فترات في المجلس ، قريبة من الشعب ، ويشعر الناس في دوائرهم الانتخابية بالنضال.

من أجل هذه الجائزة كان جازولي سعيدا وشاكرا. علاوة على ذلك ، حصل عضو كتلته مراداني أيسيرا أيضا على

والرفاهية جازولي الجويني الذي كان حاضرا على الفور الجائزة لشكر الله على هذه الثقة. وقال بالنسبة لكتلة حزب العدالة والرفاهية هذه هدية يجب أن نشعر بالامتنان لها وفي نفس الوقت نزيد من أدائنا لتكون أكثر استجابة للطموح ولموسا في الدفاع من أجل مصالح الشعب والأمة والدولة من خلال القنوات البرلمانية.

واصلت كتلة الحزب ، قال جازولي تطوير البرامج التي كانت خلقة ومبتكرة في تمثيل صوت الشعب. يوم تطلعات الشعب المستمر منذ خمس سنوات ماضية ، تستمر هذه الفترة في التحسن بإضافة أيام من الثلاثاء فقط إلى الثلاثاء والجمعة . ثبت إحصائيا أن مكونات الأشخاص الذين يتناولون تطلعاتهم في الازدياد وتصح وسيلة وقياسا ثقة الناس بمجلس النواب لتحسن. ليس فقط في المركز ، تم إطلاق هذا البرنامج أيضا كبرنامج كتلة في مجلس النواب القليمي

"نحن نواصل تطوير يوم الاستجابة للطموح هذا ليس فقط عقد اجتماعات وجهًا لوجه والتي نضيفها إلى يومين في الأسبوع ، ولكننا تطور أيضا منصات رقمية بحيث يمكن نقل التطلعات ومتابعتها والوصول إليها من

جاكرتا (١٦/٣) - أعيد انتخاب حزب العدالة والرفاهية كـ "أكثر الكتل استجابة لطموحات الشعب" في مجلس النواب في جائزة مجهر البرلمان التي عقدها وسائل الإعلام مجهر سينايان في فندق كمينسكي إندونيسيا الليلة (الثلاثين ٢٠١٦). بالإضافة إلى فئة الأكثر استجابة لطموحات الشعب ، حصل رئيس الكتلة جازولي جويني أيضا على جائزة Star of Parliament "نجم البرلمان"

في هذه الأثناء ، فاز عضو آخر من حزب العدالة والرفاهية ، مراداني أيسيرا بجائزة "صانع الأخبار". في العام الماضي في نفس الحدث ، أصبحت الكتلة أيضا "الكتلة الأكثر استجابة لطموحات الشعب". هذا ، وفقا للجنة أظهر اتساق هذه الكتلة في الدفاع عن تطلعات الشعب الإندونيسي. ليس من المبالغة إذا كانت اللجنة تأمل في أن يصبح نموذج إدارة تطلعات الشعب لحزب العدالة والرفاهية مع "برنامج يوم الاستجابة لطموحات الشعب" كل الثلاثاء والجمعة نموذجًا لمجلس النواب على المستويين المركزي والإقليمي. قبل رئيس كتلة حزب العدالة

## PROFIL

## Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M



### Membangun Bangsa diawali dari **KELUARGA**

Pekan ini dalam program #KeluargaPKS izinkan kami menemani Work From Home (WFH) rekan dan sahabat semua bersama Anggota DPR RI Fraksi PKS Drs.H. Hamid Noor Yasin, M.M. Aleg PKS dari Dapil Jawa Tengah (Jateng) IV yang meliputi Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, dan Kab. Wonogiri.

Meski lahir di Pacitan Jawa Timur pada tanggal 27 Mei 1969. Mas Hamid tumbuh dan banyak menghabiskan waktunya di Wonogiri. Sebuah Kota kecil yang berlokasi di bagian tenggara Provinsi Jawa Tengah. Kota ini identik dan dikenal

dengan asal pedagang bakso.

Hamid Noor Yasin berkhidmat di Komisi IV yang membidangi Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan. Bidang komisi yang selaras dengan aktivitasnya selama ini karena banyak bersinggungan dengan petani, nelayan dan pedagang kecil. Tidak heran, kemudian Mas Hamid pada akhirnya tercatat sebagai pembina di sejumlah organisasi dan paguyuban "wong cilik". Diantaranya, Penasehat Paguyuban Pedagang dan Pengasong Koran Wonogiri (P3KW), Penasehat Paguyuban

Seniman Jalanan Wonogiri (PSJW), Penasehat Paguyuban Pedagang Asongan Wonogiri (P3AW) dan Penasehat Paguyuban Pedagang dan Pengasong Koran Wonogiri (P3KW). Penasehat forum takmir masjid wonogiri sragen karenganyar.

Pernikahan Mas Hamid dan istri Dra Hj Endang angrahini dikaruniai lima anak. Pertama, Ayah Ansurudin lulusan S1 Teknik Sipil ITB yg saat ini sedang study S2 Tehnik sipil di UNSW Sydney Australia. Kedua, Aulia Afifah fakultas kedokteran semester 8 Ull Jogyakarta. Ketiga, Falah Fakhudin SMAIT AL HIKMAH Boyolali Jateng, keempat dan lima kembar, Hasan Abdurrahman di SDIT Al Huda Wonogiri dan Husin Abdurrahman sdit al huda wonogiri kelas 5.

Penas Hamid Noor Yasin untuk keluarga Indonesia: "di mulai dari keluarga kita membangun bangsa dan negara"

#### SOCMED

Untuk mengetahui sepak terjang Drs.H. Hamid Noor Yasin, M.M. dapat mengikuti social media:

Facebook :  
Hamid Noor Yasin

Website :  
hamidnooryasin.com



”

Di mulai dari keluarga  
kita membangun  
bangsa dan negara



*You Stay At Home,  
We Stay At Parliament*





Ketahui segala informasi  
terkini ikhtiar politik  
PKS di Parlemen

*Kunjungi*

# KANAL RESMI FRAKSI PKS DPR RI



Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



Instagram  
[fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)



Twitter  
[@fraksipksdprri](https://twitter.com/fraksipksdprri)



Facebook  
Fraksi PKS DPR RI



Youtube  
PKSTV DPR RI

[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



# LAWAN VIRUS CORONA



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

## LAWAN VIRUS CORONA

### Ketua Fraksi PKS Pimpin Penyemprotan Disinfektan di Masjid Baitul Muawwanah

*Saatnya aksi nyata melampaui narasi. Dalam ikhtiar berkontribusi mencegah penyebaran Covid 19, Sabtu (21/3) Tim Kesehatan Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, MA melakukan program penyemprotan Disinfektan di Masjid Baitul Muawwanah Perum Taman Krakatu Blok I, Kabupaten Serang, Banten*



# LAWAN VIRUS CORONA



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



## Penyemprotan di Masjid Baitul Muawwanah

Saatnya aksi nyata melampaui narasi. Dalam ikhtiar berkontri-busi mencegah penyebaran Covid 19, Sabtu (21/3) Tim Kesehatan Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, MA melakukan program penyemprotan Disinfektan di Masjid Baitul Muawwanah Perum Taman Krakatu Blok I, Kabupaten Serang, Banten

# LAWAN VIRUS CORONA



FRAKSI PARTAI KADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

*Kami turut merasakan apa yang dirasakan warga, kami melakukan apa yang bisa kami lakukan, Kita tetap berdo'a dan tawakkal kepada Allah SWT*

**Dr. H. Jazuli Juwaini, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

## LAWAN VIRUS CORONA

Kami turut merasakan apa yang dirasakan warga,  
kami melakukan apa yang bisa kami lakukan,  
Kita tetap berdo'a dan tawakkal kepada Allah SWT

**Dr. H. Jazuli Juwaini, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

## LAWAN VIRUS CORONA

### Masker untuk Petugas Medis RSIA Azzahra

Ahad (22/3) — Anggota DPR RI Nasir Djamil bersama Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, membagikan masker kepada petugas medis RSIA Azzahra. Selain membagikan kepada petugas medis pengurus DPD PKS Banda Aceh ini juga membagi - bagikan kepada warga di warung kopi maupun yang melintas di jalan raya.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



## LAWAN VIRUS CORONA

### Dr. Mulyanto Bagikan Hand Sanitizer

*Dr.H. Mulyanto, M.Eng, Aleg DPR-RI  
Fraksi PKS membagikan hand sanitizer  
kepada komunitas OJOL di kawasan  
Serpong, Tangerang Selatan.*

*Masyarakat dengan antusias menerima  
hand sanitizer ini. Kata mereka sulit  
diperoleh di apotek.*

*Semoga bermanfaat.*



## BERGERAK LAWAN CORONA

Apapun yang bisa kita bantu untuk menangani corona dan mendukung saudara-saudara kita yang sedang berjuang melayani masyarakat dan pasien corona, lakukanlah.

**Dr. H. Mardani, M.Eng**

Anggota Fraksi PKS DPR Ri Dapil DKI Jakarta I

Anggota Fraksi PKS Dapil Jakarta I Dr. H. Mardani, M.Eng dan Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si menyerahkan langsung bantuan masker serta hand sanitizer ke RS Polri Sukanto Kramat Jati, Masjid Al Huda Cililitan Besar, dan perwakilan ojek online di Jakarta Timur. pada Ahad (22/3)



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



## LAWAN VIRUS CORONA

### drh. Slamet Bagikan Masker ke Konstituen

Sukabumi (22/03) --- Mewabahnya penyakit virus corona atau covid19 mengundang perhatian anggota DPR-RI, Slamet.

Disela-sela masa reses Slamet membagikan masker untuk mencegah masyarakat terpapar virus corona.

"Pembagian masker ini dalam rangka mencegah masyarakat terpapar virus corona. Sebuah kewajiban buat kita dalam upaya menghindari penyakit yang sedang mewabah," ujar Slamet



## LAWAN VIRUS CORONA

### drh. Slamet Bagikan Masker ke sejumlah titik di Sukabumi

Sukabumi (22/03) --- Mewabahnya penyakit virus corona atau covid19 mengundang perhatian anggota DPR-RI, Slamet.

Disela-sela masa reses Slamet membagikan masker untuk mencegah masyarakat terpapar virus corona.

Pembagian masker sendiri secara khusus ditujukan kepada driver ojek online atau pangkalan serta pengguna kendaraan umum. Jumlah masker yang akan dibagikan sebanyak 1.000, namun karena stok terbatas baru 300 masker tahap pertama yang disalurkan.



# # BERGERAK LAWAN CORONA



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



## Dua Anggota Fraksi PKS Kunjungi RS Polri Kramat Jati

Dua Anggota Fraksi PKS DPR RI Anis Byarwati dan  
Mardani Ali Sera mengunjungi RS Polri Kramat Jati dan  
bertemu langsung dengan paramedis. Kunjungan  
diterima langsung pimpinan RS Polri Kramat Jati,  
beserta jajarannya.

RS Polri Kramat Jati adalah salah satu dari beberapa  
rujukan pasien Covid-19 di wilayah Jakarta Timur,  
selain RS Persahabatan dan RS. Duren Sawit.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

KUANG PERAWAT

## LAWAN VIRUS CORONA

### Rofik Hananto Inspeksi kesiapan RSUD Goeteng Hadapi Covid -19

Kunjungan Anggota DPR RI FPKS H. Rofik Hananto ke RSUD Goeteng Taroenadibrata, Purbalingga Diterima langsung oleh Dirut RSUD Goeteng dr. Nonot Mulyono, Mkes dan Kabid Pelayanan dr. Sulistyorini, Mkes. Selain melakukan inspeksi atas kesiapan RSUD, Pak Rofik juga memberikan bantuan sebagai bentuk dukungan dan penghargaan atas dedikasi Pemkab Purbalingga dan RSUD Goeteng melawan Corona.

Selain ke RSUD Goeteng, Pak Rofik juga melakukan kunjungan serupa ke RS Harapan Ibu yang diterima langsung oleh dr. Isti Hayati, Direktur RSUD Harapan Ibu Purbalingga





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

## LAWAN VIRUS CORONA

### Nur Azizah Tamhid Bagikan Masker dan Handsantizer

Depok (23/03) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS Nur Azizah Tamhid, bersama Imam Budi Hartono Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat FPKS turut aktif mencegah penyebaran Covid-19 di Depok, Ahad, (22/03/2020).

Hal itu dilakukan Anggota Komisi VIII DPR RI berdasarkan Instruksi Presiden PKS No: 02/D/INT/DPP-PKS/2020 tentang Prioritas Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Virus Corona) & Bantuan Sosial (Ta'awun), Arahan Ketua Fraksi PKS DPR RI serta Arahan Kepala BNPB RI yang sekaligus Mitra Komisi VIII.





FRAKSI PARTAI KADILAY SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



## BERGERAK LAWAN CORONA

Apa yang kami lakukan hanya salah satu ikhtiar.  
Masih banyak langkah yang harus  
kita lakukan



**H. Ahmad Syaikhu**  
Anggota Komisi V DPR RI





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

## LAWAN VIRUS CORONA

PKS terpanggil untuk ikut bersama-sama tim medis dan masyarakat menanggulangi bahaya persebaran virus corona. Bagi kami ini adalah kondisi darurat yang perlu segera diatasi. Untuk itu semua jajaran PKS, mulai dari kader hingga pimpinan partai bergerak dengan segala kemampuan untuk turut dalam upaya penanggulangan bencana ini

**Dr. H. Mulyanto, M.Eng**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten I



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



## LAWAN VIRUS CORONA

Kegiatan sosial ini bukan pengumpulan warga atau masyarakat namun kami menyapa dan mendatangi mereka yang sedang beraktifitas tersebut, serta membagikan masker dan hand sanitizer kepada mereka yang belum menggunakan alat tersebut agar tidak terpapar covid-19

**Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar VI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

## LAWAN VIRUS CORONA

Polri bersama instansi terkait perlu mengambil langkah untuk menjaga ketersediaan bahan pokok, masker dan sanitiser. Pada konteks ini Polri dapat membantu distribusi dan melakukan penetrasi pengamanan. Selain itu dapat pula dilakukan langkah taktis agar harga barang tersebut tidak melangit, dan dapat terjangkau untuk masyarakat

**Habib Aboe Bakar Alhabsyi**

Anggota Komisi III DPR RI